



**PEMERINTAH  
DAERAH  
KABUPATEN  
PURWAKARTA**



**PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI  
LAPORAN SEMESTER II  
PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN  
TAHUN 2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, kami dengan hormat menyampaikan laporan mengenai penanganan pengaduan perizinan yang telah diterima oleh instansi kami selama Juli sampai dengan Desember 2023. Laporan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjaga integritas serta efisiensi dalam proses perizinan.

Pengaduan yang kami terima mencakup lingkup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami menerima keluhan terkait layanan lamanya proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, hingga keluhan terhadap pelayanan petugas serta pengaduan dari pelaku usaha atau masyarakat pada perusahaan yang telah berizin tetapi melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan tindakan-tindakan yang telah kami ambil dalam menangani pengaduan tersebut, termasuk langkah-langkah yang telah ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem perizinan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan kepada kami. Dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha, kami yakin bahwa kita dapat terus meningkatkan kualitas layanan perizinan dan memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan lancar dan efisien.

Laporan ini dibuat dengan itikad baik dan harapan besar bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang telah kami lakukan akan memenuhi harapan masyarakat. Kami juga tetap terbuka untuk menerima masukan lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pelayanan penanganan pengaduan perizinan di masa depan.

Demikian Laporan Semester II ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwakarta, 29 Desember 2023

Ketua Tim Layanan Informasi, Konsultasi  
dan Pengaduan Masyarakat

Mengetahui,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purwakarta



**Hariman Budi Anggoro, ST, MT**  
NIP. 19790605 200501 1 013



**Lingga Kencana, S.Pd**  
NIP. 19790201 200901 2 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pelayanan perizinan merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan kelancaran berbagai aktivitas usaha dan kegiatan masyarakat. Dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan publik yang berkualitas, kami telah menerima sejumlah pengaduan terkait proses perizinan selama periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penanganan pengaduan perizinan yang telah kami terima, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan proses perizinan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengaduan yang diterima mencakup beragam masalah, seperti keluhan terhadap kelambatan proses perizinan, ketidakjelasan persyaratan, pelayanan yang kurang memuaskan, dan masalah lain yang berkaitan dengan pemberian izin. Kami menganggap setiap pengaduan sebagai peluang untuk merenung, belajar, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, laporan ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keinginan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam bagian-bagian berikutnya, laporan ini akan membahas berbagai aspek pengaduan perizinan, termasuk analisis masalah yang dihadapi, tindakan korektif yang telah diterapkan, serta upaya untuk memperbaiki sistem perizinan secara keseluruhan. Semua langkah yang telah kami ambil bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan perizinan yang kami sediakan kepada masyarakat.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pengaduan kepada kami, serta berharap bahwa laporan ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya perbaikan yang telah kami lakukan. Kami juga tetap terbuka untuk menerima saran dan masukan lebih lanjut yang dapat membantu kami dalam menjalankan tugas kami dengan lebih baik.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan laporan penanganan pengaduan perizinan ini adalah :

- **Transparansi:** Maksud utama adalah untuk menjaga tingkat transparansi dalam operasional instansi yang berkaitan dengan pemberian perizinan. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana instansi menangani pengaduan masyarakat terkait perizinan, sehingga pihak-pihak terkait dan masyarakat dapat memahami prosesnya. Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat atas partisipasinya dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan;
- **Evaluasi Kualitas Pelayanan:** Laporan ini membantu dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pemohon perizinan. Ini memberikan wawasan tentang sejauh mana instansi telah memenuhi harapan pemohon dan apakah ada ruang untuk perbaikan. Membangun sistem pengelolaan pengaduan secara terintegrasi;

- **Perbaikan Proses:** Maksudnya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan dalam proses perizinan dan merancang langkah-langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian izin;
- **Akuntabilitas:** Penyusunan laporan ini adalah bentuk akuntabilitas institusi terhadap masyarakat. Ini menunjukkan keseriusan instansi dalam mengatasi pengaduan dan memberikan solusi yang tepat.

Tujuan penyusunan laporan penanganan pengaduan perizinan :

- **Meningkatkan Pelayanan Publik:** Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait perizinan. Melalui laporan ini, instansi dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- **Memperbaiki Proses Perizinan:** Laporan ini membantu dalam mengidentifikasi masalah dalam proses perizinan dan tujuannya adalah untuk merancang perubahan dan perbaikan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan.
- **Mengatasi Keluhan dan Pengaduan:** Laporan ini bertujuan untuk merespons pengaduan yang telah diterima dari masyarakat dan mencari solusi yang memuaskan bagi pemohon serta menciptakan dan membangun kepercayaan masyarakat.
- **Meningkatkan Akuntabilitas:** Tujuan lain adalah meningkatkan akuntabilitas institusi pemerintah terhadap masyarakat. Laporan ini menunjukkan bahwa instansi mengambil tindakan atas pengaduan yang diterima dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- **Transparansi dan Partisipasi Masyarakat:** Laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proses tersebut.
- **Pengambilan Keputusan yang Informatif:** Laporan ini memberikan data dan informasi penting yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki pelayanan perizinan.

Dengan memahami maksud dan tujuan penyusunan laporan penanganan pengaduan perizinan, DPMPTSP dapat lebih efektif merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan serta menjaga komitmen untuk memberikan layanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat.

### C. DASAR HUKUM

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman



- Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
- ❖ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - ❖ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - ❖ Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan di DPMPTSP mencakup seluruh tahapan proses penanganan pengaduan, dari penerimaan hingga pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. diantaranya :

1. Penerimaan Pengaduan:
2. Registrasi dan Dokumentasi:
3. Klasifikasi Pengaduan:
4. Pemeriksaan Awal:
5. Penanganan Pengaduan:
6. Investigasi dan Analisis:
7. Monitoring dan Pelaporan:
8. Kepatuhan dengan Ketentuan Hukum dan Regulasi:
9. Pelibatan Masyarakat
10. Transparansi dan Akses Informasi
11. Kepatuhan Etika dan Profesionalisme:

Kami memastikan bahwa pengaduan ditangani secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. PROFIL

Pada era digital ini banyak hal yang berubah diantaranya percepatan informasi, sehingga hal ini menyebabkan banyaknya kolaborasi dan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan melakukan sejumlah perubahan dalam pelayanan publik.

#### 1. Visi Dan Misi

##### **VISI**

Mewujudkan Purwakarta Istimewa

##### **MISI**

- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial.
- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional.
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.
- Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

#### 2. Tugas Pokok Dan Fungsi

##### **Tugas Pokok**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas-tugas yang diberikan kepada Daerah.

##### **Fungsi**

- Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan penanaman modal;
- Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan penanaman modal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

### 3. Maklumat

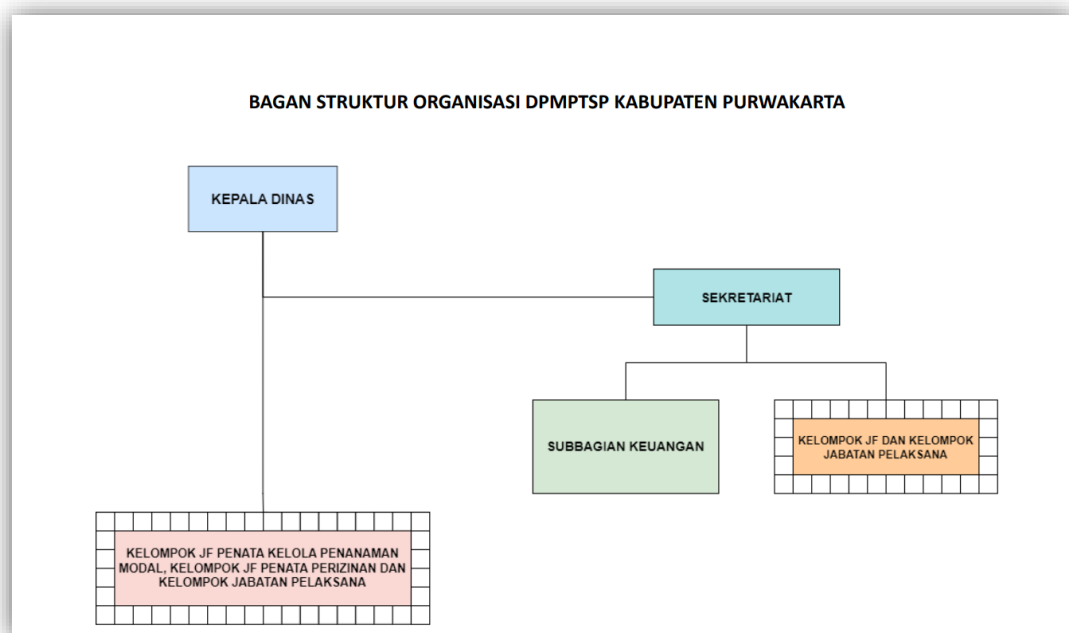
- Kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan
- Kami menyatakan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan
- Kami menyatakan bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

### 4. Motto

MOTTO DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Adalah:  
"Pelayanan Sepenuh Hati"

### 5. Susunan Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



### 6. Kewenangan

Kewenangan DPMPTSP adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ditingkat Pemerintah Kota;
- b. Pemrosesan dan penandatanganan dokumen perizinan;
- c. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;

- d. Penyederhanaan prosedur perizinan;
- e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama unsur lain di lingkungan Pemerintah Kota;
- f. Penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala/periodik (perbulan) dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## B. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan Pengaduan, sumber daya manusia masih sangat terbatas, anggaran maupun sarana dan prasarana. Adapun komposisi sumber daya tersebut sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di layanan perizinan pengaduan dalam disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi.

Adapun kompetensi sumber daya manusia, terdiri atas :

- Penata Perizinan Ahli Muda merupakan pengendali atas pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- Analis Pengaduan Pelayanan Publik merupakan petugas yang mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan serta menyusun rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berkala.
- Petugas Pengelola Pengaduan di Mal Pelayanan Publik bertugas menerima aspirasi pengaduan pelayanan publik, memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan dan menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

**Tabel 1 : Komposisi Substansi Pengaduan Berdasarkan Jabatan**

NO	FUNGSI		JUMLAH
1	Penata Perizinan Ahli Muda		1 Orang
2	Pelaksana	Analis Pengaduan Pelayanan Publik	1 Orang
3	Petugas	Pengelola Pengaduan MPP	2 Orang



## 2. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan tahun 2023 ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta dengan nama Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Alokasi anggaran tahun 2023 di Semester II ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.500,-, yang tadinya sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi 29.990.500,- dan di Semester II ini telah di realisasikan sebesar :

**Tabel 2 : Alokasi Anggaran Penanganan Pengaduan**

SEMESTER	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) s.d SEMESTER II	PERSENTASE (%)
II	2023	29.990.500	17.371.400	57,29%

## 3. Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta menyediakan layanan “**GARDU PASTI**” (Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi), yang diantaranya :

- Penyampaian secara lisan atau tatap muka langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta.
- Melalui korespondensi atau surat menyurat yang dapat dimasukkan ke dalam kotak saran/pengaduan di tempat layanan tersedia atau ditujukan ke alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jl. Veteran No. 139 Kabupaten Purwakarta.
- Mengisi formulir GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta.
- Website : [dpmptsp.purwakartakab.go.id](http://dpmptsp.purwakartakab.go.id)
- Website MPP Bale Madukara : [mpp.purwakartakab.go.id](http://mpp.purwakartakab.go.id)
- E-mail DPMPTSP : [ptsppurwakartakab@gmail.com](mailto:ptsppurwakartakab@gmail.com)
- E-mail MPP Bale Madukara : [mppmadukara@gmail.com](mailto:mppmadukara@gmail.com)
- E-mail Pengaduan : [pengaduanptspp139@gmail.com](mailto:pengaduanptspp139@gmail.com)
- IG DPMPTSP : [dpmptsp.purwakarta](https://www.instagram.com/dpmptsp.purwakarta)
- IG MPP Bale Madukara : [mppmadukara](https://www.instagram.com/mppmadukara)
- Situs Media Online

- Saluran langsung pada telepon kantor (0264) 8224794
- SMS Gateway Pengaduan / Whatsapp (0818 09898222)
- Rapat Koordinasi
- Instruksi Pimpinan

Dan di dukung juga oleh sarana dan prasarana, antara lain :

**Tabel 3 : Sarana Pendukung Pengaduan**

NO	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH	KONDISI
1	Komputer	2017	1 unit	Baik
2	HP Pengaduan	2020	1 unit	Baik
3	Komputer Pengaduan MPP	2021	1 unit	Baik
4	Formulir Pengaduan	2023	20 berkas	Baik

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN**

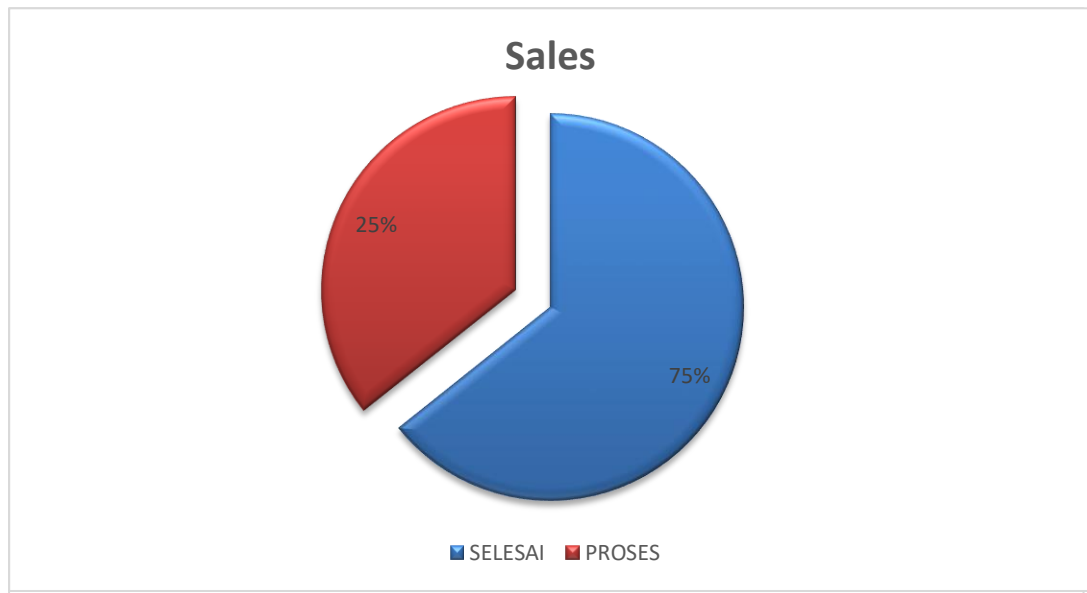
**A. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN**

**1. Status Penanganan Pengaduan Perizinan**

Substansi Pengendalian sub Substansi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta dari mulai tanggal 3 Juli s.d 29 Desember 2023 telah menerima pengaduan sebanyak 24 permasalahan dengan status penanganan pengaduan perizinan sebagai berikut :

**Tabel 4 : Status Penanganan Pengaduan Perizinan**

NO	STATUS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Selesai	18	75%
2	Proses	6	25%
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>100%</b>



**2. Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan**

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPTSP per saluran selama kurun waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram dibawah ini :

**Tabel 5 : Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan**

<b>NO</b>	<b>SALURAN PENGADUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tatap muka	-
2	Korespondensi / surat menyurat	1
3	Formulir Pengaduan Manual	3
4	Barcode Form Garuda Pasti	3
5	Website DPMPTSP	5
6	E-mail DPMPTSP	-
7	E-mail MPP Bale Madukara	-
8	Instagram (IG) DPMPTSP	-
9	Instagram (IG) MPP Bale Madukara	-
10	Situs Media Online	2
	Diskominfo (PISA) SP4N L4POR	1
11	Telepon Kantor	-
12	SMS / Whatsapp	6
13	Rapat Koordinasi	-
14	Instruksi Pimpinan	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>



### 3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Tahun 2023

**Tabel 6 : Penanganan Pengaduan Perizinan**

LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA  
SEMESTER II TAHUN 2023

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
1	10 Juli 2023	Instruksi Pimpinan	PT. ICL Valve Global		Jl. Cikopo-Tanjung Garut Kp. Cinta Karya Kec. Bungursari Kab. Purwakarta	Perizinan dan Non Perizinan	Permohonan verifikasi Sertifikat Standar terkendala bahwa perusahaan harus berlokasi di Kawasan Industri sesuai surat dari Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI	31 Juli 2023	21			Rapat Pembahasan Permohonan Fasilitas Perizinan Berusaha dari PT. ICL Valve Global	> Perizinan Dasar (PKKPR,PBG dan Persetujuan Lingkungan/SPPL) sudah dimiliki > Belum bisa merekrut tenaga kerja karena mesin dan peralatan produksi masih tertahan di Bea Cukai dan untuk mengeluarkan mesin tersebut perusahaan wajib melampirkan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi	DKUPP, Bagian Hukum dan DPMPTSP melakukan fasilitasi permasalahan pelaku usaha dalam menyelesaikan kegiatan usahanya berupa surat permohonan fasilitasi ke Kementerian Perindustrian yang akan dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta	V			
2	21 Juli 2023	Ulasan google	Muhamad Faiz Al-ghifari	Disnakertrans		Pelayanan	Kurangnya sosialisasi pendaftaran online untuk pembuatan kartu kuning	21 Juli 2023	1	V		Koordinasi dengan pejabat pengelola	Keluhan langsung disampaikan ke pihak Disnakertrans yang ada di MPP Bale Madukara		V			
3	02 Agustus 2023 Tanggal diterima disposisi 07 Agustus 2023	Formulir Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi	Sabam Hutapea	Wifi Fiber Star	Jl. Pasar Leuwi Panjang RT 003 RW 001 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta	Izin Lingkungan	Keberatan terkait berdirinya tiang wifi Fiber Star di lahan milik Sdr. Sabam Hutapea	24 Agustus 2023	17	V		Inspeksi lapangan	Permasalahan berdirinya tiang internet wifi telah selesai ditangani oleh DPMPTSP dan selanjutnya permasalahan tersebut ditangani oleh aparat setempat	Pihak RT atau aparat setempat akan mencabut tiang internet wifi Fiber Star apabila sampai dengan akhir bulan agustus ini pihak Fiber Star tidak mencabut tiang tersebut	V			
4	07 Agustus 2023	Ulasan google	Anisa Nisa	Imigrasi		Pelayanan	Buruknya pelayanan	07 Agustus 2023	1	V		Koordinasi dengan pejabat pengelola	Keluhan langsung disampaikan ke pihak Imigrasi yang ada di MPP Bale Madukara		V			
5	09 Agustus 2023	Whatsapp pengaduan	Edy Lcs Indomaret	Alfamart Cibungur	Alfamart Cibungur dekat masjid pertigan dangdeur	Kriminalitas	Perampokan di Alfamart Cibungur yang terjadi pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIB dengan kerugian sekitar Rp. 80 Juta	09 Agustus 2023	1	V		Koordinasi dengan Dinas Teknis	Menyampaikan berita terjadinya perampokan di Alfamart Cibungur ke OPD teknis untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya	Satpol PP langsung menindaklanjuti ke Tempat Kejadian Perkara	V			
6	09 Agustus 2023 Tanggal diterima disposisi 10 Agustus 2023	Whatsapp Gardu Pasti	Satuan Polisi Pamong Praja	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Indomarco Primatama		Himbauan Jam Operasional Minimarket	Minimarket tidak mematuhi kesepakatan bersama yang tertuang di berita acara pada saat rapat tindak lanjut dari inspeksi lapangan ke Alfamart di Jl. Raya Darangdan sehingga terjadi perampokan pada tanggal 09 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB	10 Agustus 2023	1	V		Surat Himbauan untuk PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Indomarco Primatama	Dinas teknis ( Satpol PP ) sudah memberikan surat himbauan jam operasional minimarket untuk PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Indomarco Primatama	PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Indomarco Primatama harus mematuhi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan kesepakatan bersama yang tertuang di berita acara pada saat rapat tindak lanjut dari inspeksi lapangan ke Alfamart di Jl. Raya Darangdan				

LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA  
SEMESTER II TAHUN 2023

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)		WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
									SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP	SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
7	14 Agustus 2023	Whatsapp Pengaduan	Sri Wahyuni	DPMTSP Kabupaten Purwakarta		Perizinan dan Non Perizinan	Menanyakan terkait Izin Operasional an. Yayasan Insan Afiyah Al-Ma'arj ( KB NusaRaya 2), Yayasan Nurul Qolby (KB Nurul Qolby) dan Yayasan Nur Wulan Putri Iyana (KB NusaRaya 3) yang sudah 1 tahun lebih belum terbit	15 Agustus 2023	1	V			Berkoordinasi dengan penata perizinan ahli muda terkait Izin Operasional tersebut	> Permohonan an. KB Nurul Qolby dan KB Nusaraya 3, Izin operasionalnya sudah terbit dan sudah diambil oleh yang bersangkutan > Untuk berkas yang lainnya karena ada perubahan regulasi sehingga permohonan akan didaftarkan ulang ke sistem	Tanggal 24 Agustus 2023 menginformasikan kepada pemohon untuk pengajuan Izin an. KB Nusaraya 2 (KRK) , KB Nurul Qolby (KRK) telah di resi ulang dan akan diadakan pengecekan lapangan untuk KB Nusaraya 3 karena terkena LP2B		V		
8	21 Agustus 2023	Ulasan google	Desi Pitriani	Tidak mencantumkan nama pihak yang dilaporkan		Pelayanan	Sistem pelayanan lambat/slow respon	19 Agustus 2023	1	V			Koordinasi dengan pejabat pengelola	Tidak adanya tindak lanjut karena tidak jelas pihak yang dilaporkan		V			
9	28 Agustus 2023	Formulir Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi	Asep Jamaludin	Bea Cukai	MPP Bale Madukara	Jam Operasional	Keterlambatan masuk jam kerja dan pelayanan di Bea Cukai yang bertempat di MPP Bale Madukara	28 Agustus 2023	1	V			Koordinasi dengan pihak Bea Cukai	Bea Cukai sudah menerima adanya aduan tersebut	> Berkas pengaduan terkait layanan Bea Cukai telah langsung disampaikan kepada tenant bea cukai di tanggal 28 Agustus 2023 > Tanggal 29 Agustus 2023 berkoordinasi dengan Ketua Tim Pengelola MPP dan MPP Digital terkait lambatnya pelayanan bea cukai telah di sampaikan ke tenant bea cukai di saat itu juga dan kita menunggu sampai 11 hari ke depan apabila tidak ada perubahan akan diberikan peringatan secara tertulis	V			
10	28 Agustus 2023	Pembahasan lanjutan tentang permasalahan CV. Solvi Indonesia	DPRD Kab. Purwakarta	CV. Solvi Indonesia	Aula DPMTSP Kab. Purwakarta	Pelanggaran Tata Ruang	Perizinan dan Non Perizinan	28 Agustus 2023	1	V			Koordinasi	Kunjungan kerja anggota DPRD Komisi I ke DPMTSP membahas permasalahan CV. Solvi Indonesia dan akan diadakan rapat kembali dengan DPMTSP dan Dinas Teknis (jadwal rapat akan diberitabukan kembali oleh DPRD)	Anggota Komisi I DPRD Purwakarta yang akan mengundang OPD teknis		V		
11	30 Agustus 2023 Tanggal diterima disposisi 05 September 2023	Formulir Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi	Budiman	Villa Naraloka	MPP Bale Madukara	Izin Lingkungan	Adanya kebisingan atau kegiatan villa naraloka dan diduga bangunan tersebut belum memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Izin dari warga sekitar	31 Agustus 2023	1	V			Koordinasi melalui Whatsapp	Menyarankan ke pihak pengadu untuk berkoordinasi dengan aparat desa setempat RT, RW, Kelurahan/Desa dan Kecamatan untuk tindak lanjutnya	Menyampaikan surat kepada OPD Teknis dengan no surat : PW.04.02/861-Dalaks/2023 Tanggal 13 September 2023	V			
								13-Sep-23	9	V		Bersurat kepada OPD teknis	Menyampaikan surat kepada OPD Teknis dengan no surat : PW.04.02/861-Dalaks/2023 Tanggal 13 September 2023	Satpol PP telah melaksanakan monitoring dan pengawasan ke villa naraloka pada tanggal 14 September 2023 dengan no surat : PW.04.03/1294-SatpolPP/2023 Tanggal 20 September 2023					

LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA  
SEMESTER II TAHUN 2023

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
								20-Sep-23	5	V		Bersurat kepada pihak pengadu	Menyampaikan surat kepada saudara Budiman sebagai pihak pengadu dengan no surat : PW.04.02/890-Dalaks/2023 Tanggal 20 September 2023					
12	05 September 2023 Tanggal diterima disposisi 07 September 2023	Formulir Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi	M. Sulaeman	Gudang Buah Manggis	MPP Bale Madukara	Perizinan dan Non Perizinan	Adanya dugaan pembangunan proyek gudang buah manggis yang belum memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	08-Sep-23	1	V		Koordinasi melalui Whatsapp	Telah berkoordinasi dengan DPUTR bahwa perizinan untuk proyek pembangunan gudang manggis telah ditempuh serta sedang dalam proses pengesahan perizinannya oleh DPUTR dalam beberapa hari kedepan	Menyampaikan surat kepada OPD Teknis dengan no surat : PW.04.02/862-Dalaks/2023 Tanggal 13 September 2023	V			
								13-Sep-23	3	V		Bersurat kepada OPD teknis	Menyampaikan surat kepada OPD Teknis dengan no surat : PW.04.02/862-Dalaks/2023 Tanggal 13 September 2023	Satpol PP telah melaksanakan monitoring dan pengawasan ke pembangunan gedung untuk gudang buah manggis pada tanggal 19 September 2023 dengan no surat : PW.04.03/1293-SatpolPP/2023 Tanggal 20 September 2023				
								20-Sep-23	5	V		Bersurat kepada pihak pengadu	Menyampaikan surat kepada saudara M. Sulaeman sebagai pihak pengadu dengan no surat : PW.04.03/1293-Dalaks/2023 Tanggal 20 September 2023					
13	19 September 2023 Tanggal diterima disposisi 20 September 2023	Berita Online dari Media Mitra Hukum Bhayangkara	M. Sulaeman	Pengelolaan Limbah Bulu Ayam di Kecamatan Darangdan	Whatsapp	Perizinan dan Non Perizinan	Diduga belum memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	20-Sep-23	1	V		Koordinasi dengan OPD Teknis	Bukti pengaduan disampaikan kepada OPD Teknis sesuai kewenangannya		V			
								27-Sep-23	5			Bersurat kepada OPD teknis	Menyampaikan surat kepada OPD Teknis dengan no surat : PW.04.02/921-Dalaks/2023 Tanggal 27 September 2023					Tanggal 03 Oktober 2023 berkoordinasi dengan DLH melalui telepon seluler dan akan diadakan rapat gabungan dengan OPD teknis untuk pemecahaan permasalahan tersebut
14	27-Sep-23	Ulasan google	Tya	Petugas Kemanan MPP Madukara		Pelayanan	Layanan Keamanan	27 September 2023	1	V		Koordinas	Koordinasi dengan pejabat pengelola MPP	Keluhan langsung disampaikan ke pihak aparat keamanan MPP Bale Madukara	V			
15	29-Sep-23	Whatsapp pengaduan	Denald Citra Multi			Tidak dapat daftar akun di aplikasi madukara eror sistem	Sistem aplikasi di madukara eror	29 September 2023	1	V		Koordinasi dengan tim IT	Permasalahan telah ditindaklanjuti oleh tim IT dan pemohon dapat mendaftar kembali di akun aplikasi madukara	V				

LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA  
SEMESTER II TAHUN 2023

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN PENGADUAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
16	14 Agustus 2023	Whatsapp Pengaduan	Sri Wahyuni	DPMTSP Kabupaten Purwakarta	-	Perizinan dan Non Perizinan	Menanyakan terkait Izin Operasional an. Yayasan Insan Afyah Al-Ma'arif ( KB NusaRaya 2), Yayasan Nurul Qolby (KB Nurul Qolby) dan Yayasan Nur Wulan Putri Isyana (KB NusaRaya 3) yang sudah 1 tahun lebih belum terbit	02 Oktober 2023	27	V		Berkoordinasi dengan perizinan	Menginformasikan kepada yang bersangkutan bahwa yayasan an. KB Nusraya 2 (KRK) , KB Nurul Qolby (KRK) berkas izin Operasional telah selesai dan dapat diambil di MPP Bale Madukara		V			
17	19 September 2023 Tanggal diterima disposisi 20 September 2023	Berita Online dari Media Mitra Hukum Bhayangkara	M. Sulaeman	Pengelolaan Limbah Bulu Ayam di Kecamatan Darangdan	Whatsapp	Perizinan dan Non Perizinan	Diduga belum memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Instalasi Pembersihan Air Limbah (IPAL)	03 Oktober 2023	4			Bersurat kepada pihak pengadu	Menyampaikan surat kepada saudara M. Sulaeman sebagai pihak pengadu dengan no surat : PW.04.02/936-Dalaks/2023 Tanggal 03 Oktober 2023	> Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP via telepon seluler dan mereka ingin adanya kejelasan terkait kewenangan masing-masing dinas > Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas akan diadakan rapat tindaklanjut dengan dinas teknis		V		
18	26 Oktober 2023 Tanggal diterima disposisi 30 Oktober 2023	Barcode Form Gardu Pasti	M. Sulaeman	Bangunan tower di Desa Depok Kec. Darangdan	Desa Depok Kec. Darangdan	Perizinan dan Non Perizinan	Di duga pembangunan tower sinyal internet di wilayah Desa Depok Kec. Darangdan Kp. Nanggaleng yang belum memiliki izin	06 November 2023	5	V		Bersurat kepada Dinas Teknis dan Pengadu	Menyampaikan Surat kepada DPUTR dan Satpol PP dengan nomor Surat PW.04.02/1069-Dalaks/2023 tanggal 03 November 2023 Menyampaikan surat kepada Saudara Sulaiman dengan nomor surat PW.04.02/1080-Dalaks/2023 tanggal 06 November 2023		V			
19	3 November 2023 Tanggal diterima disposisi 7 November 2023	Barcode Form Gardu Pasti	M. Sulaeman	Pengelolaan Limbah Bulu Ayam di Kecamatan Darangdan	Desa Depok Kec. Darangdan	Perizinan dan Non Perizinan	Terkait dengan adanya tempat pengelolaan limbah bulu ayam yang berlokasi di Jl. Militer Desa Depok Kec. Darangdan, masyarakat Darangdan menginginkan tempat tersebut untuk di tutup karena sudah sangat membahayakan kesehatan masyarakat	07 November 2023	3	V		Telah ditindak lanjut dengan surat sebelumnya	Menyampaikan surat kepada saudara M. Sulaeman sebagai pihak pengadu dengan no surat : PW.04.02/936-Dalaks/2023 Tanggal 03 Oktober 2023	> Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP via telepon seluler dan mereka ingin adanya kejelasan terkait kewenangan masing-masing OPD > Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas akan diadakan rapat tindaklanjut dengan dinas teknis		V		
20	06-Nov-23	Barcode Form Gardu Pasti	Riska Ristiani	Aplikasi Gaspol	MPP Bale Madukara	Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan SIP telah selesai proses di aplikasi gaspol tetapi setelah selesai mendapatkan email untuk mengunjungi MPP Bale Madukara. Setelah sampai ditempat baru dijelaskan jika SIP yang telah selesai bisa dicetak langsung oleh masing-masing akun, diharapkan DPMTSP dapat mengubah deskripsi email agar tidak terjadi kesalah pahaman	06 November 2023	1	V		Berkoordinasi dengan perizinan	Ditindaklanjuti oleh penanggungjawab aplikasi gaspol DPMTSP dan sudah terselesaikan	Dalam aplikasi gaspol sudah dirubah untuk template email yang dikirimkan ke pemohon jika proses pengajuannya sudah selesai		V		
21	14-Nov-23	Diskominfo PISA	Anonim	Perumahan Bukit Residence Purwakarta (PT. Mega Mustika Putra)	MPP Bale Madukara		Permasalahan pembayaran angsuran rumah yang sudah 15 kali di bayar di Perumahan Bukit Residence Purwakarta tetapi belum siap untuk dihuni	20 November 2023	6	V		Berkoordinasi dengan Pimpinan	Menyampaikan jawaban kepada Tim Layanan Pengaduan MPP agar disampaikan kepada Diskominfo Ogan Lopian pada aplikasi PISA bahwa angsuran permasalahan perumahan tersebut bukanlah kewenangan DPMTSP sesuai dengan Perbup Purwakarta No. 247 Tahun 2021	20 November 2023 Telah disampaikan oleh petugas Ogan Lopian Purwakarta kepada pemohon atau pengadu bahwa hal tersebut bukan kewenangan DPMTSP via Aplikasi PISA		V		



LAPORAN REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA  
SEMESTER II TAHUN 2023

NO	TANGGAL DITERIMA PENGADUAN	SALURAN PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA / PIHAK YANG DILAPORKAN	LOKASI PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	PERMASALAHAN	TANGGAL PENANGANAN PENGADUAN	DURASI PENANGANAN (HARI KERJA)	WAKTU PENANGANAN PENGADUAN		METODE PENANGANAN PENGADUAN	HASIL PENANGANAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS			KET
										SESUAI SOP	TIDAK SESUAI SOP				SELESAI	DALAM PROSES	TIDAK SELESAI	
22	14-Nov-23	Surat	Warga Masyarakat Perumahan Kota Permata	PT. Binawan	Jalan Perum Kota Permata		Keluhan warga masyarakat akan kegiatan usaha PT. Binawan yang menggunakan fasilitas Jalan Perum Kota Permata	15 November 2023	1	V		Berkoordinasi dengan Pimpinan	Permasalahan jalan tersebut bukanlah kewenangan DPMPTSP tetapi lebih ke permasalahan lingkungan setempat sehingga permasalahan telah di selesaikan oleh warga dan aparat desa setempat di lingkungan Perumahan Kota Permata		V			
23	16-Nov-23	Lembar Disposisi Sekda Purwakarta	Masyarakat Kec. Darangdan	Tempat Pengelolaan Limbah Bulu Ayam	Desa Depok Kec. Darangdan	Izin Lingkungan	Surat keberatan dan penolakan warga masyarakat akibat adanya tempat pengelolaan limbah bulu ayam yang membuat resah dan mengakibatkan gangguan pernafasan dikarenakan bau busuk yang sangat menyengat	17 November 2023	1	V		Berkoordinasi dengan Pimpinan dan OPD teknis	Telah menyampaikan surat kepada OPD Teknis dengan no surat : PW.04.02/921-Dalaks/2023 Tanggal 27 September 2023 untuk mereka tindaklanjuti sesuai kewenangannya	17 November 2023 telah bertemu secara langsung dengan Pj. Bupati bahwa DPMPTSP telah bersurat kepada OPD Teknis berdasarkan no surat : PW.04.02/921-Dalaks/2023 Tanggal 27 September 2023 untuk mereka tindaklanjuti sesuai kewenangannya	V			
24	21-Dec-23	Whatsapp Pengaduan	Letda Ckm dr. M. Suharto Pane, M.K.M (Dokter Pribadi Pangkostrad)	Perizinan DPMPTSP	MPP Bale Madukara	Perizinan dan Non Perizinan	Terkendala pengurusan SIP yang memerlukan perbaikan	21 Desember 2023	1	V		Berkoordinasi dengan Ketua Tim Teknis Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Langsung ditindaklanjuti di Tanggal 21 Desember 2023 oleh petugas tim teknis sektor kesehatan dengan cara pendampingan dipandu cara pengisiannya via pesan WA Tim Verifikasi Gaspol		V			

KETERANGAN :

1	SELESAI	: 18
2	DALAM PROSES	: 6
3	TIDAK SELESAI	: 0
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>

## B. HAMBATAN

Hambatan dalam pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan di Semester II tahun 2023 ini diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya: Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sumber daya, termasuk personel, dana, dan teknologi yang diperlukan untuk menangani pengaduan. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat kemampuan instansi dalam merespons dengan cepat dan memadai terhadap pengaduan.
2. Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan: Keterampilan khusus dalam menangani pengaduan, termasuk kemampuan komunikasi dan negosiasi, seringkali diperlukan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan staf dapat menjadi hambatan serius.
3. Kompleksitas Hukum dan Regulasi: Proses penanganan pengaduan seringkali terkait dengan aspek hukum dan regulasi. Kurangnya pemahaman yang cukup dalam terhadap aspek hukum yang terkait dapat menghambat penyelesaian yang efektif.
4. Ketidaktransparan Proses: Jika proses perizinan atau penanganan pengaduan tidak transparan, masyarakat dapat merasa frustrasi dan kurang percaya. Ketidaktransparan ini dapat menciptakan hambatan dalam penanganan pengaduan.
5. Birokrasi yang Rumit: Birokrasi yang kompleks dan prosedur yang rumit dalam penanganan pengaduan dapat menghambat efisiensi dan memperlambat penyelesaian.
6. Ketidakjelasan Peran dan Tanggung Jawab: Jika tidak ada peran dan tanggung jawab yang jelas dalam penanganan pengaduan, ini dapat menyebabkan tumpang tindih atau ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat menghambat proses.
7. Ketidakmampuan Berkomunikasi dengan Jelas: Komunikasi yang buruk antara instansi yang menerima pengaduan dan pemohon dapat menyulitkan pemahaman masalah yang ada dan menghambat resolusi.
8. Ketidakpuasan Masyarakat: Ketidakpuasan yang berkembang di kalangan masyarakat akibat pengaduan yang tidak teratasi dengan baik dapat memunculkan hambatan, seperti protes atau gugatan hukum.
9. Ketidakmampuan untuk Mengukur Kinerja: Tanpa sistem pengukuran kinerja yang efektif, sulit untuk mengevaluasi efektivitas penanganan pengaduan. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam perbaikan proses.
10. Ketidakpercayaan Masyarakat: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau instansi yang menangani pengaduan bisa menjadi hambatan serius dalam menerima dan menangani pengaduan dengan baik.

### C. UPAYA PENYELESAIAN

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan penanganan pengaduan diantaranya:

1. Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengoptimalan anggaran;
2. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media;
3. Membentuk tim khusus di internal DPMPTSP dan Tim Gabungan dengan instansi teknis terkait;
4. Telah tersedianya kanal GARDU PASTI di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara;
5. Melakukan koordinasi dan pembinaan secara rutin terkait validasi data pengaduan oleh masing-masing petugas layanan pengaduan;
6. Mekanisme koordinasi dengan OPD teknis dilakukan melalui mekanisme rapat tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu dilakukan langkah-langkah seperti alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan staf, peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur, dan berfokus pada kepuasan pemohon. Selain itu, komunikasi yang baik dan keterlibatan masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan ini.

### BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penanganan Pengaduan Perizinan ini ditangani oleh Tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat beserta Tim Teknis terkait. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Perizinan Semester II di tahun 2023 sebanyak 24 permasalahan dengan status permasalahan **Selesai** sebanyak **18** dan **Dalam Proses** sebanyak **6**.

#### B. SARAN

Penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Perizinan ini menyajikan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan selama satu 1 (satu) semester yang memuat atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah tercapai di semester akhir tahun 2023 serta merupakan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat ke depannya.

Pelaksanaan layanan publik yang diberikan diharapkan dapat terus di pertahankan dan di tingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik antara setiap Sub Sektor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta khususnya petugas layanan informasi, konsultasi dan pengaduan serta petugas dan pejabat back office begitu juga halnya dengan petugas tim teknis dari Dinas yang ditujuk. Selain itu perlu terus dilakukan sosialisasi dan informasi yang berkelanjutan ke masyarakat ataupun pelaku usaha agar usaha atau kegiatan yang dilakukan setiap warga masyarakat sudah dilengkapi izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

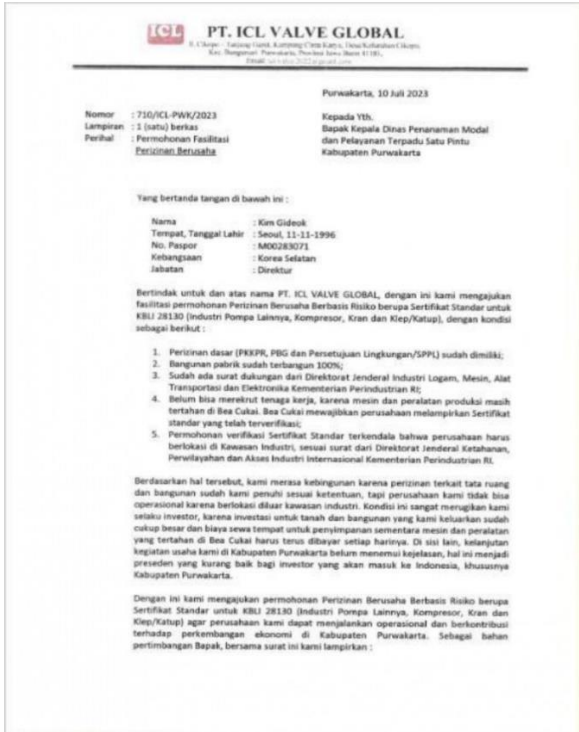
## LAMPIRAN - LAMPIRAN

**DOKUMENTASI PENANGANAN  
PENGADUAN PERIZINAN  
TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER)  
TAHUN 2023**



# TINDAK LANJUT RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA DARI PT. ICL VALVE GLOBAL

( 31 JULI 2023 )



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwokarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

Purwokarta, 20 Juli 2023

Nomor : TU.04/658-PENGDAL/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Penting  
Perihal : Undangan

Kepada Yth.  
1. Kepala Dinas Koperasi, UKM,  
Perdagangan dan Perindustrian  
2. Kepala Bagian Hukum Setda  
di-  
Purwokarta

Berdasarkan surat PT. ICL VALVE GLOBAL Nomor 710/ICL-PWK/2023 Tanggal 10 Juli 2023 Perihal Permohonan Fasilitas Perizinan Berusaha, bahwa PT. ICL VALVE GLOBAL Kec. Cikopo-Kec. Bungursari Kab. Purwokarta mengalami kendala dalam penerbitan Sertifikat Standar untuk KBLI 28130 (Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup).  
Menindaklanjuti hal tersebut dan sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwokarta yaitu memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan ini kami mengundang Saudara atau mengaskan pegawai yang berwenang untuk hadir pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Juli 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Aula DPMPTSP Kabupaten Purwokarta  
Jl. Veteran No. 139 Purwokarta  
Map : <https://bit.ly/kantordpmptspwkw>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARMAN BUDI ANGGORO, ST, MT  
Perbita TL / IV B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

DAFTAR HADIR

HARI : Senin  
 TANGGAL : 31 Juli 2023  
 WAKTU : Pukul 10.00 WIB  
 KEGIATAN : Rapat Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha a.n. PT. ICL Valve Global

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	TANDA TANGAN
1	Herman	DPMP2SP	0817205374	[Signature]
2	Hosni Lubis	DPMP2SP	087879797973	[Signature]
3	Kuntjaja	DPMP2SP	087879797973	[Signature]
4	Amalia Juliantina	Baq. Keul-	081020392684	[Signature]
5	Melinda Wif	Baq. Keul-	001701426169	[Signature]
6	Herman	DKUPP	087879797973	[Signature]
7	Abdumuc W	DKUPP	081546558815	[Signature]
8	Sugil	ICL	085122415288	[Signature]
9	Amir Sidiq	DPMP2SP	081108202029	[Signature]
10	Dewi Susanti	DPMP2SP	0818619636	[Signature]
11	Lingga Kemana	DPMP2SP	081807041808	[Signature]
12	Yogi Septian Firm	DPMP2SP	081385512504	[Signature]
13	Sri Amalia	DPMP2SP	081317504840	[Signature]
14	Octiani	DPMP2SP	0821888818	[Signature]
15	Lina	DPMP2SP	087879797973	[Signature]
16	Rita	DPMP2SP	081281899921	[Signature]
17	Metta RM	DPMP2SP	082121391983	[Signature]

18	Santobina	DPMP2SP	081802848492	18 [Signature]
19	Titi	"	08522629052	19 [Signature]
20	Anif M	DPMP2SP	0852101757	20 [Signature]
21	Dan C...	"	08777981002	21 [Signature]
22				22
23				23
24				24
25				25



PERHIMPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 (DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 179 Purwakarta 41115  
 Telp./Fax 0264 822709 Email: [komunikasi@kabupat.purwa.go.id](mailto:komunikasi@kabupat.purwa.go.id)

**NOTULEN RAPAT**

Hari / Tanggal : Senin, 31 Juli 2023  
 Waktu : 09.30 s.d Selesai  
 Tempat : Aula DPMPTSP  
 Acara : Rapat Pembahasan Pemohonan Fasilitas Perizinan Berusaha dari PT ICL Valve Global  
 Pimpinan Rapat : Heri Kurniawan Yusopo, SH  
 Notulis : Dewi Susanti, SKM, MKM  
 Peserta Rapat : 1. Unsur dari DPMPTSP Kabupaten Purwakarta  
 2. Unsur dari DKUPP Kabupaten Purwakarta  
 3. Unsur dari Bagian Hukum Kabupaten Purwakarta

Rapat ini dilaksanakan atas dasar surat permohonan fasilitas perizinan berusaha dari PT ICL Valve Global untuk mengajukan fasilitas pemohonan berusaha berbasis resiko berupa: Sertifikat Standar untuk KRL 28130 (Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Krm dan Klep/Katup), dengan kondisi sebagai berikut:

1. Perizinan Dasar (PKKH, PIIG dan Peractujuan Lingkungan/SPL) sudah dimiliki
2. Bangunan pabrik sudah terbangun 100%
3. Sudah ada surat dukungan dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI
4. Belum bisa merekrut tenaga kerja, karena mesin dan peralatan produksi masih tertahan di Bea Cukai, dan utk mengeluarkan mesin tersebut perusahaan wajib melampirkan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi
5. Pemohonan verifikasi Sertifikat Standar terkendala bahwa perusahaan harus berlokasi di Kawasan Industri, sesuai surat dari Direktorat Jenderal Ketahanan, Perovlayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta membuka rapat ini, bahwa akan menfasilitasi kendala yang terjadi pada PT ICL Valve Global dengan membuat surat ke Kementerian Perindustrian.

**Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP)**

Kronologi permasalahan, PT ICL kesulitan mengeluarkan mesin yang tertahan di bea cukai karena untuk mengeluarkan mesin tersebut harus ada Sertifikat Standar yang telah terverifikasi, untuk permohonan verifikasi Sertifikat Standar tersebut perusahaan harus berlokasi di kawasan industri, sesuai dengan UU no 3 tahun 2014 pasal 106, bahwa Perusahaan Industri yang akan menjalankan usahanya wajib berada di lokasi Kawasan Industri. Sedangkan PT ICL tidak berlokasi di Kawasan Industri, hal ini yang menjadi kendala dalam pemenuhan permohonan nya.

Langkah yang sudah ditempuh pihak DKUPP untuk menfasilitasi permasalahan ini:

- Sudah mendampingi PT ICL sampai ke Kementerian Perindustrian, dan mengajukan Surat Keterangan Pengecualan Lokasi di luar Kawasan Industri
- Sudah mendampingi PT ICL dengan mengadakan pertemuan di propinsi sampai 3 kali

Progres nya:

- Surat dukungan dari Kementerian Perindustrian
- Surat Penjelasan yang muncul di SINAS dan tinggal ditanda tangan Dirjen

**Bagian Hukum Sekretariat Daerah :**

Mempertanyakan kepada PT ICL, mengapa pabrik sudah dibangun padahal beberapa syarat belum terpenuhi dan tidak menempatkan perusahaannya di Kawasan Industri sesuai dengan UU No. 3 tahun 2014. Sebenarnya sebelum membuat perusahaannya itu diluluskan dahulu dengan pihak yang terkait.

**PT. ICL Valve Global :**

Perusahaan belum bisa berproduksi karena mesin ditahan di bea cukai dan merasa keberatan dengan biaya sewa inap mesin yang dikeluarkan setiap harinya. Tadinya akan mengembalikan mesin, tapi setelah melakukan konsultasi dengan beberapa unsur terkait dari Penda, dan ada solusi dari permasalahan ini, PT. ICL tidak jadi mengembalikan mesin, dan jika sertifikat standar sudah keluar akan segera melakukan produksi.

**DPMP2SP :**

Mesin tertahan di bea cukai, syarat untuk mengeluarannya harus ada Sertifikat Standar yang telah terverifikasi, akan tetapi karena lokasi PT ICL diluar Kawasan Industri, maka Sertifikat Standar belum bisa diverifikasi.

Selaku dari kendali ini, sebagai dorongan dari unsur terkait Perizinan Kabupaten Purwakarta dalam hal ini DKUPP, Bagian Hukum dan DPMPTSP untuk mempermudah mesin keluar dari bea cukai, dengan melakukan fasilitas pemohonan perizinan, maka dalam perkembangan laporan masalah.

Dorongan tersebut berupa surat permohonan fasilitas ke Kementerian Perindustrian yang akan dibuat oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta selaku instansi yang berkekuatan pada peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,  
 SETIA RAJA ANAK BERSAMA,  
 KONSULTASI DAN PENYIANG  
 MASYARAKAT

[Signature]  
 LINGGA KEMBARA, S.Pd  
 NIP. 1976001 260901 2 001

Mengetahui,  
 DEWI SUSANTI, SKM, MKM  
 NIP. 1973009 199903 2 001



DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN PERMOHONAN FASILITASI PERIZINAN  
BERUSAHA DARI PT. ICL VALVE GLOBAL  
SENIN 31 JULI 2023  
AULA DPMPPTSP KABUPATEN PURWAKARTA



## DOKUMENTASI ULASAN GOOGLE MPP BALE MADUKARA ( JUM'AT, JULI 21 2023 )



**Muhamad Faiz Al-Ghifari**

1 ulasan

★★★★★ 4 bulan lalu

Pelayanannya kurang, seharusnya dibuatkan poster untuk tata cara membuat kartu kuning supaya tetap tertib dan kasian orang yang gatau apa<sup>2</sup> 🙄

👍 Suka

## DOKUMENTASI PENYAMPAIAN ULASAN GOOLE MPP BALE MADUKARA KEPADA PETUGAS DISNAKERTRAN YANG ADA DI BALE MADUKARA ( JUM'AT, 21 JULI 2023 )





**DOKUMENTASI MENERIMA PENGADUAN DARI BAPAK SABAM HUTAPEA TERKAIT BERDIRINYA TIANG WIFI DI TANAH MILIK BAPAK SABAM HUTAPEA TANPA SEIZIN PEMILIK TANAH YANG BERLOKASI DI PASAR LEUWI PANJANG RT. 03 RW. 01 KELURAHAN PURWAMEKAR KECAMATAN PURWAKARTA MAL PELAYANAN PUBLIK BALE MADUKARA (RABU / 2 AGUSTUS 2023 )**

**FORMULIR PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI**

**DATA PEMBERI ADUAN**

Nama : SABAM HUTAPEA  
 Jenis Kelamin : LAKI  
 Alamat Rumah : DI. PAS. LEUWI PANJANG RT. 03/ RW. 01  
 Pekerjaan/Instansi : Swasta  
 Alamat Kantor : tbolossow@gmail.com  
 Email : tbolossow@gmail.com  
 No. KTP : 321401701470001  
 No. Telp : 081281512125

**JENIS PENGADUAN**

Jenis Aduan/Urutan : Keberatan Atas Tiang Wifi yg berdiri di Tanah Saya

Tujuan Pengaduan :  
 Sumber Informasi :  
 Data Pendukung :  Ya (dilampirkan dengan dokumen asli)  Tidak  
 Cara Menyampaikan Aduan :  Diteruskan langsung  Kurir  Pos  E-mail  Faksimili

Purwakarta, 2/8-2023

Penerima : [Signature]  
 Pemberi Aduan : [Signature]  
 NIP. : S. Sabam Hutapea



**FORMULIR PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI**

**DATA PEMBERI ADUAN**

Nama : SABAM HUTAPEA  
 Jenis Kelamin : LAKI  
 Alamat Rumah : DI. PAS. LEUWI PANJANG RT. 03/ RW. 01  
 Pekerjaan/Instansi : Swasta  
 Alamat Kantor : tbolossow@gmail.com  
 Email : tbolossow@gmail.com  
 No. KTP : 321401701470001  
 No. Telp : 081281512125

**JENIS PENGADUAN**

Jenis Aduan/Urutan : Keberatan Atas Tiang Wifi yg berdiri di Tanah Saya

Tujuan Pengaduan :  
 Sumber Informasi :  
 Data Pendukung :  Ya (dilampirkan dengan dokumen asli)  Tidak  
 Cara Menyampaikan Aduan :  Diteruskan langsung  Kurir  Pos  E-mail  Faksimili

Purwakarta, 2/8-2023

Penerima : [Signature]  
 Pemberi Aduan : [Signature]  
 NIP. : S. Sabam Hutapea

**KARTU SURAT MASUK**

Indeks : PM Kode : PM No. urut : 538

Perihal : Pengaduan  
 Isi Ringkas : Pengaduan

Dari : Pengaduan Terpadu Perizinan & Investasi

Tanggal surat : 2-8-2023 No. Surat :                      Lampiran :                     

Pengolah : Ketua Tim Pengaduan Tgl. Diteruskan : 7-8-2023 Tanda terima : [Signature]

Catatan :                     

---

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 (D P M P T S P)**

Jl. Vondra No. 139 Purwakarta 41115  
 Telp/Fax (0264) 8224794 Email : dmpmpsp@yahoo.com

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Pengaduan Terpadu Perizinan & Investasi Diterima Tgl : 7 Agustus 2023  
 No. Surat :                      No. Agenda : 538  
 Tgl. Surat : 2 Agustus 2023  Segera  Segera  Revisi  Bina

Perihal : Pengaduan

Diteruskan kepada saudara :  Sekretaris  Tanggapan dan Saran  Ketua Tim Pengaduan  Proses Lebih Lanjut  IF  Koordinasi/Konfirmasi 2/8-2023  
 Kasubag Keuangan  Sdr / Sdri

Catatan :

**TINDAK LANJUT PENINJAUAN/PEMERIKSAAN LAPANGAN  
PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN  
TIANG INTERNET WIFI DI LAHAN BPK. SABAM HUTAPEA  
(25 AGUSTUS 2023)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 21 Agustus 2023

Nomor : TU.04/750 – Pengdal/2023  
Lampiran : -  
Sifat : Penting  
Perihal : **Pemeriksaan Lapangan**

Kepada Yth.  
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
3. Camat Purwakarta  
4. Kepala Kelurahan Purwamekar

di-  
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, memindaki formulir pengaduan terpadu perizinan dan investasi tanggal 02 Agustus 2023 dari saudara Sabam Hutapea perihal keberatan atas berdirinya tiang wifi di tanahnya tanpa seizin pemiliknya.

Maka dengan ini, kami mengundang pegawai yang membentangi untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke lokasi tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 25 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Lokasi : Lahan milik sdr. Sabam Hutapea  
Jl. Desa Leuwi Panjang RT. 003/001  
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Purwakarta, 21 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 24 Agustus 2023

Nomor : PM/764 – Pengdal/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembertitahuan Peninjauan Lapangan**

Kepada Yth.  
Bapak Sabam Hutapea  
Jl. Pasar Leuwi Panjang RT. 003/001  
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, memindaki formulir pengaduan terpadu perizinan dan investasi yang disampaikan oleh Sdr. Sabam Hutapea pada tanggal 02 Agustus 2023 di Mal Pelayanan Publik Hale Madakara yang pada ini pengaduan adanya keberatan terkait berdirinya tiang wifi di lahan miliknya.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami dari DPMPTSP bersama-sama dengan perangkat Dinas terkait akan melaksanakan peninjauan lapangan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 25 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Lahan milik sdr. Sabam Hutapea  
Jl. Pasar Leuwi Panjang RT. 003/001  
Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Purwakarta, 24 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**SURAT PERINTAH**

Nomor : KPG.11.01/269-Pengdal/2023

Nama : **Heriman Budi Anggoro, ST., MT.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

1. Nama : **Rd. Heri Lukman Yusup, SH**

NIP : 19651017 199302 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

2. Nama : **Lingga Kusnana, S.Pd**

NIP : 19750201 200901 2 001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

3. Nama : **Kasno Adhij Wibowo, SP, M. Tr.A.P**

NIP : 19861118 200501 1 002

Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)

Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

4. Nama : **Ahmad Soleh, SE**

NIP : 19940519 202203 1 008

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Pengawas Penanaman Modal

Untuk :

Melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka penanganan pengaduan perizinan ke Lahan milik sdr. Sabam Hutapea di Jl. Desa Leuwi Panjang RT 003 RW 001 Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Dasar :

Formulir pengaduan terpadu perizinan dan investasi tanggal 02 Agustus 2023 dari saudara Sabam Hutapea perihal keberatan atas berdirinya tiang wifi di tanahnya tanpa seizin pemiliknya.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**BERITA ACARA RAPAT/PEMERIKSAAN LAPANGAN  
 TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT**  
 NO : BA /031 /Fengkal /VIII /2023

**A. DASAR**

1. Laporan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat :

**2. Formulir/ Surat Pengaduan Masyarakat :**

Formulir Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi dari Bapak Sabam Hutapea pada Tanggal 2 Agustus 2023 yang disampaikan di Mal Pelayanan Publik Bale Mudikara.

**B. Maksud dan Tujuan**

Untuk memutuskan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai :

Keberatan atas berdirinya tiang wifi di tanah milik Bapak Sabam Hutapea tanpa izin pemilik tanah yang berlokasi di Banjar Lewali Barabang RT. 03 / RW. 01 Kelurahan Purnawasari Kecamatan Purwokerto

**C. WAKTU DAN TEMPAT**

Rapat/pemeriksaan lapangan diadakan pada :

Hari : Sabtu  
 Tanggal : 2 Agustus 2023  
 Pukul : 09.30

Tempat : Lokasi tanah milik Bapak Sabam Hutapea  
 Jl. Bar Lewali Barabang RT.03/RW.01 Kel. Purnawasari

**D. PEMERIKSAAN/PEMERIKSA LAPANGAN**

Ketua Tim Layanan Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat

**E. PESERTA RAPAT/PEMERIKSA LAPANGAN**

- Utusan dari DPMP/TSP
- Utusan dari Satfah PP
- Utusan dari Kelurahan
- Aparat setempat

**F. SARAN PENDAPAT**

**\* Petak RT. 03 :**

- Sebaiknya ada pengaman dari sisi Sabam Hutapea, pihak lingkungan RT-03 tidak erogasikan Komplain ke pihak Petak RT. 03. Penanganan dari lingkungan sebelah utara Balu Agungur akan membuat tiang wifi.

**\* Pak Sabam Hutapea :**

- Pihak Petak RT tidak meminta izin kepada pemilik lahan, sehingga Bapak Sabam Hutapea untuk melapor atau mengadu ke pihak RT/RW serta DPMP/TSP BARU PAKTI yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPL) Bale Mudikara.

**\* DPMP/TSP :**

- Sesuai dengan permohonan aduan dari Bapak Sabam Hutapea, pihak DPMP/TSP memfasilitasi permasalahan dengan melakukan peninjauan ke lokasi, dan sesuai dengan kemungkinannya permasalahan tersebut ditindaklanjuti oleh aparat desa atau lingkungan setempat. DPMP/TSP juga telah berkoordinasi dengan pihak lingkungan setempat. DPMP/TSP wifi yang berdiri, bahwa sampai dengan saat ini belum ada Petak yang mengahar tentang pendirian bangunan wifi atau tiang wifi sehingga apabila ada permasalahan kembali seperti ini diselesaikan secara berkolaborasi dengan pihak Provider Internet, aparat setempat dan pemilik lahan.

**\* Kelurahan :**

- Bapak Sabam Hutapea sudah melapor juga ke Petak Kelurahan dan Petak Kelurahan langsung berkoordinasi dengan RT - RW setempat dan pemilik lahan juga dan ditindaklanjuti kepastian bahwa sampai dengan akhir Agustus tiang tersebut tidak dipindahkan, maka aparat setempat akan membuat paku tiang wifi tersebut.

**G. KEPUTUSAN RAPAT/PEMERIKSA LAPANGAN**

Permasalahan berdirinya tiang internet wifi telah selesai ditangani oleh DPMP/TSP dan oleh aparat permasalahan tersebut ditangani oleh aparat setempat sesuai dengan kewenangannya.

**H. RENCANA TINDAK LANJUT**

Pihak RT atau aparat setempat akan membuat tiang internet wifi Fiber Star apabila sampai dengan akhir Bulan Agustus ini pihak Fiber Star tidak membuat tiang tersebut.

**I. PENUTUP**

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan tindak lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat.

Purwokerto, 25 Agustus 2023

Mengratih,

Pimpinan/Penanggungjawab  
 Perusahaan

Ketua Tim Layanan Informasi,  
 Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat

Nama : S.H.A.P.P.T  
 Jabatan :

Nama : Lingga Kencana  
 Jabatan : Kepala Perizinan Ahli Muda  
 Instansi : DPMP/TSP

**Peserta yang Hadir**

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.	Hari Widiana	DPMP/TSP	
2.	Lingga Kencana	DPMP/TSP	
3.	Karto P	Kelurahan	
4.	Dian. Hurnawix	RT 03/01	
5.	Dhoni Firmansyah	Satfah PP	
6.	Egi Arianto	Satfah PP	
7.	DEDE SAKIPOUN	STAF KELURAHAN	
8.	Almond SAR	DPMP/TSP	
9.	SARAH SAKIPOUN	MA PURWAK	
10.	Ary Heri	ke m. ke	
11.			
12.			
13.			

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Ketua Tim Layanan Informasi,  
 Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat

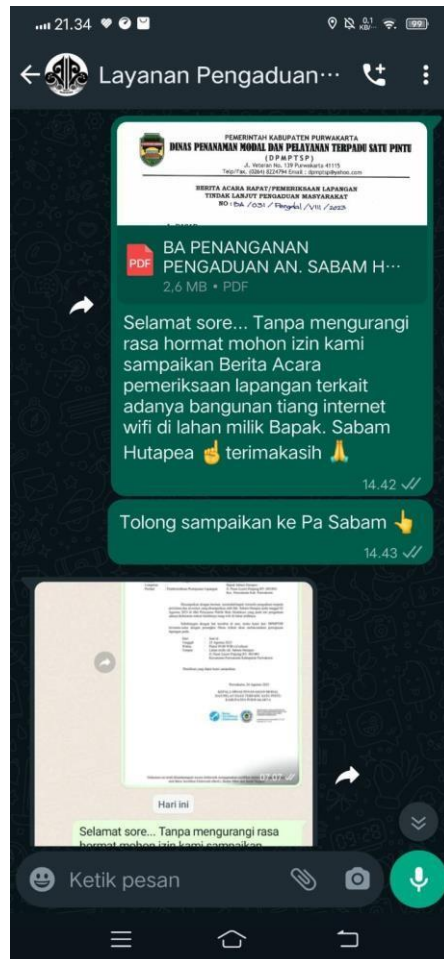
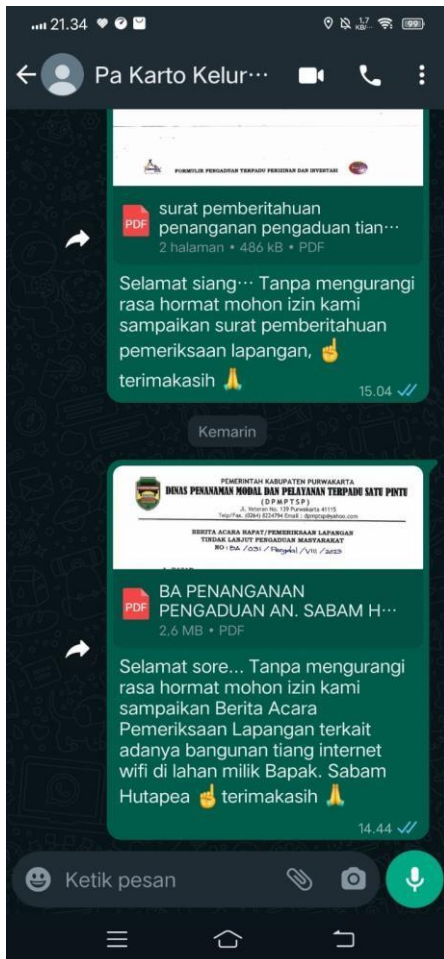
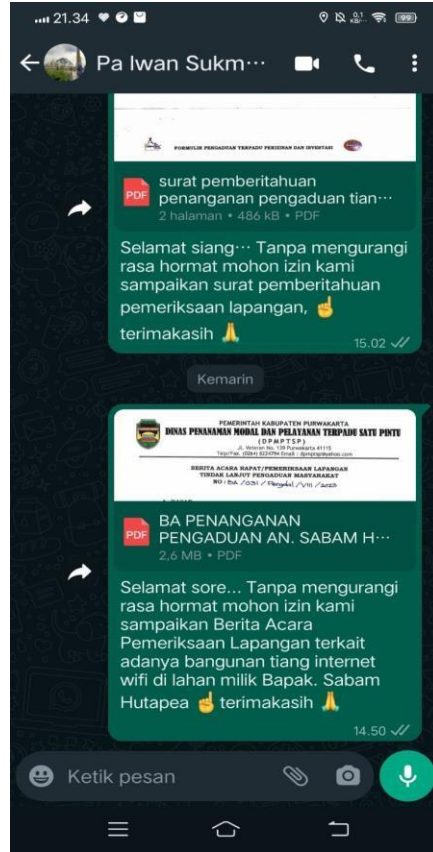
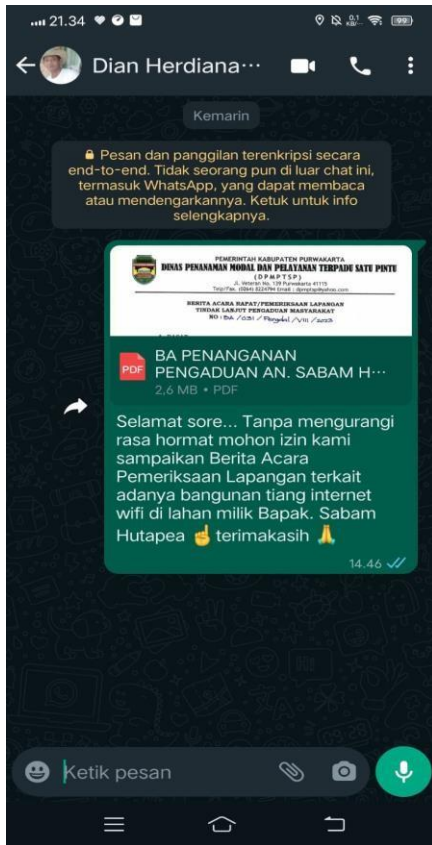
**Lingga Kencana, S.Pd**  
 NIP. 197902012009012001



**DOKUMENTASI HASIL PENINJAUAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN  
ATAS PENGADUAN DARI BAPAK SABAM HUTAPEA TERKAIT BERDIRINYA TIANG WIFI DI  
TANAH MILIK BAPAK SABAM HUTAPEA TANPA SEIZIN PEMILIK TANAH  
YANG BERLOKASI DI PASAR LEUWI PANJANG RT. 03 RW. 01  
KELURAHAN PURWAMEKAR KECAMATAN PURWAKARTA  
( JUM'AT /25 AGUSTUS 2023)**



**BUKTI PENYAMPAIAN BERITA ACARA  
MELALUI PESAN SINGKAT WHATSAPP  
(28 AGUSTUS 2023)**



**DOKUMENTASI ULASAN GOOGLE MPP BALE MADUKARA  
( SENIN 07 AGUSTUS 2023 )**



**Anisa Nisa**

3 ulasan

★★★★★ 2 bulan lalu

Kalau ada bintang 0, SANGAT BURUK untuk pelayanan imigrasi



1

**DOKUMENTASI PENYAMPAIAN KELUHAN DARI ULASAN GOOGLE TERKAIT  
LAYANAN IMIGRASI KEPADA PETUGAS IMIGRASI YANG ADA DI MPP BALE  
MADUKARA.  
( SENIN, 07 AGUSTUS 2023 )**





**LAPORAN PENGADUAN MELALUI PESAN SINGKAT WHATSAPP TERKAIT  
ADANYA PERAMPOKAN DI ALFA CIBUNGUR YANG BUKA 24 JAM  
(9 AGUSTUS 2023)**



**BUKTI TINDAK LANJUT LAPORAN PENGADUAN YANG DI SAMPAIKAN  
KE DINAS TEKNIS (DKUPP DAN SATPOL PP)  
SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MELALUI PESAN SINGKAT WHATSAPP  
(9 AGUSTUS 2023)**



# BUKTI TINDAK LANJUT DARI SATPOL PP BERUPA SURAT HIMBAUAN KEPADA PT. INDOMARCO DAN PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk (11 AGUSTUS 2023)





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta (41111) Telp / Fax. (0264) 8393886  
PURWAKARTA

Purwakarta, 10 Agustus 2023

Nomor : HK.06 / 1149 – Gakda / 2023      Kepada  
Sifat : Penting                                      Yth: PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan  
Lampiran : -    PT. Indomarco Prismatama  
Perihal : **Himbauan Jam Operasional Minimarket**      di-

**TEMPAT**

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Surat Kepala DPMPSTP Nomor : TU.04 / 573-Pengendalian / 2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Berita Acara Rapat Pembahasan Jam Operasional Minimarket.

Sehubungan hal tersebut, dihimbau kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT. Indomarco Prismatama agar mematuhi kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Jam Operasional Minimarket tanggal 22 Juni 2023 serta ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut :

**Pasal 21**

(2) Jam Operasional mini market Pukul 08:00 Wib sampai dengan 22:00 Wib


**Pasal 72**

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin; dan / atau
- d. pembatalan izin.

Demikian untuk menjadi bahan perhatian.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah distandartisasi secara elektrik yang teresifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

**KARTU SURAT MASUK**

No. : HK.06      550

Perihal: Himbauan Jam Operasional Minimarket

Isi: Himbauan Jam Operasional Minimarket

Dari: \_\_\_\_\_

Tanggal surat: No. Surat: Lampiran: \_\_\_\_\_

10. 8 - 2023      HK.06/1149 - Gakda/2023      -

Pengantar: Tgl. Diteruskan: Tanda terima: \_\_\_\_\_

Kelu. dan Pengacker 2 Bangun      10. 8 - 2023      \_\_\_\_\_

Catatan: \_\_\_\_\_

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**BIKES PERAKSIAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
(DPMPSTP)  
Jl. Vanda No. 129 Purwakarta 41111  
Telp/Fax (0264) 832474 Email: [dpmpstp@kab-purwakarta.go.id](mailto:dpmpstp@kab-purwakarta.go.id)

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari: Satpol PP      Ditinjau tgl: \_\_\_\_\_

No. Surat: HK.06/1149 - Gakda/2023      No. Agenda: \_\_\_\_\_

Tgl. Surat: 10 Agustus 2023       Tenggat waktu     Segera     Menyes     Menunda

Perihal: Himbauan Jam Operasional Minimarket

Ditindaklanjuti kepada saudara:      Dengan hormat harap:

Sekretaris       Tanggapan dan Saran

Kepala Tim Raport 5       Proses Lebih Lanjut

# Sugandhar       Rencanaku/Keputusan

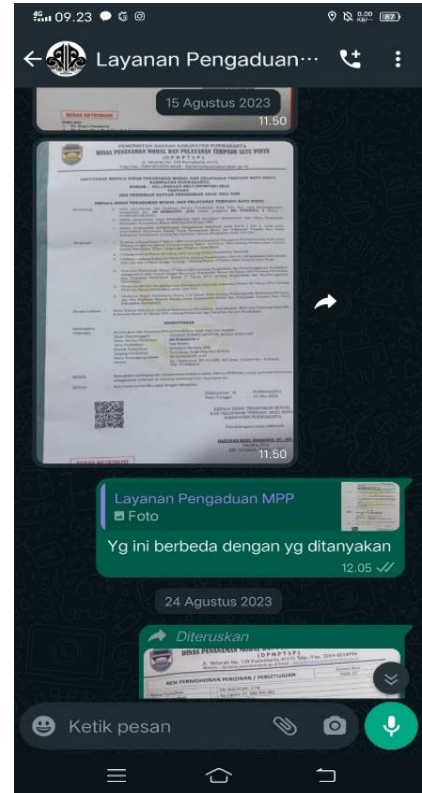
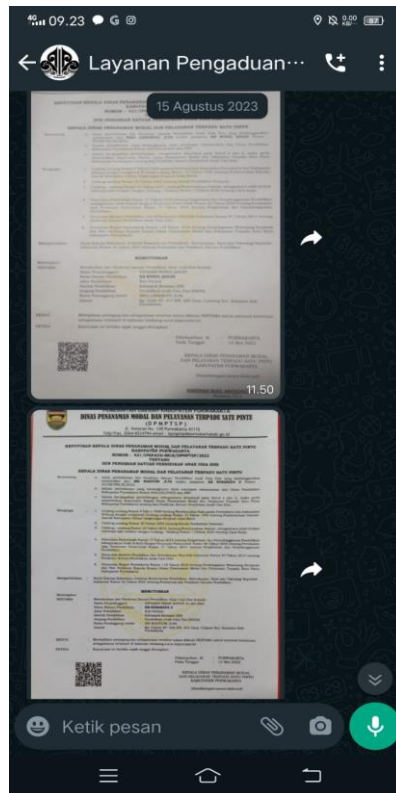
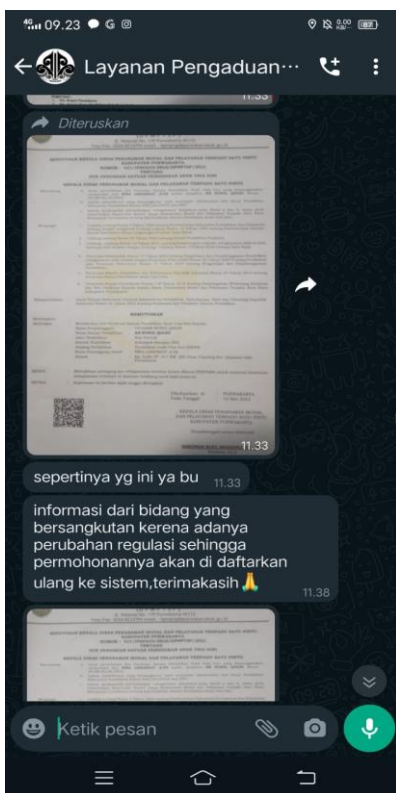
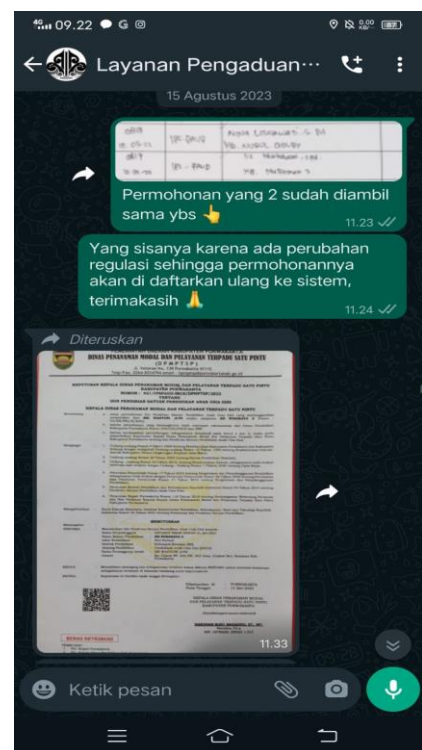
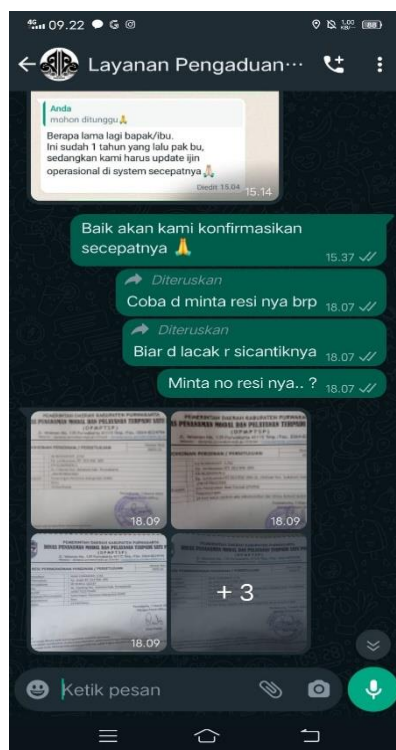
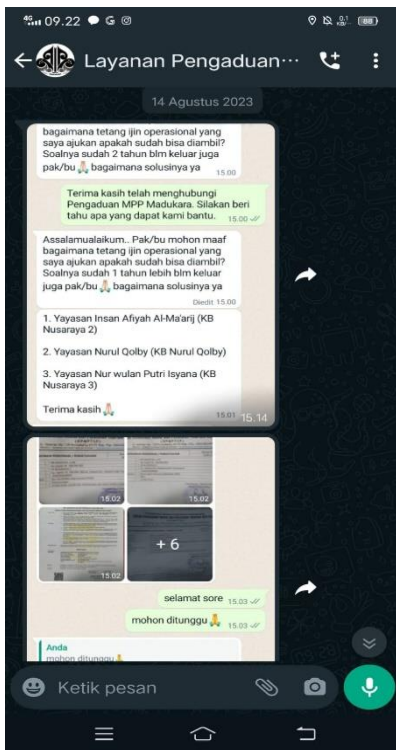
Rencanaku Rancangan       Sub / Sub

Catatan: 1/ bahan sudah lengkap

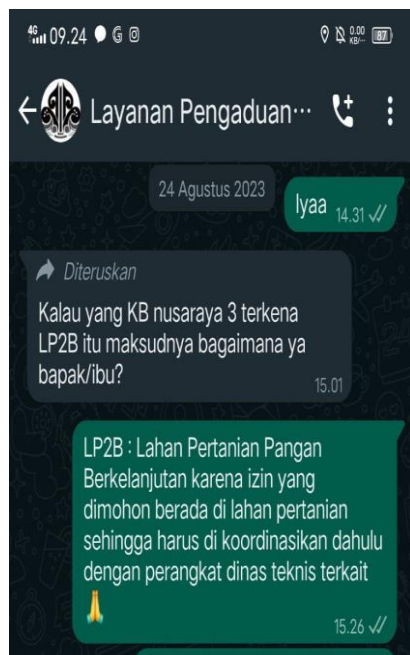
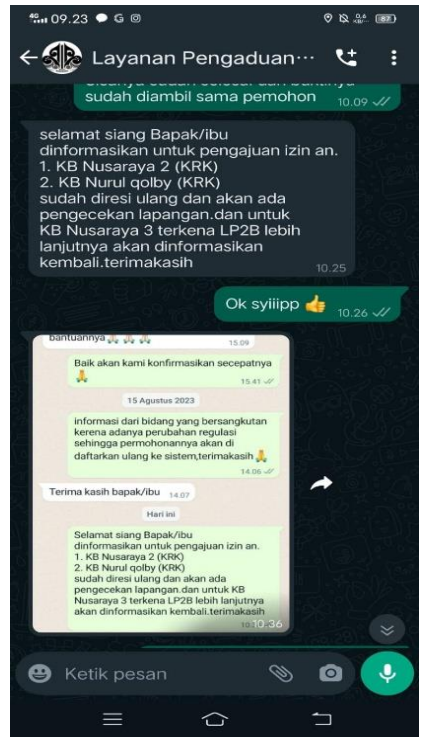
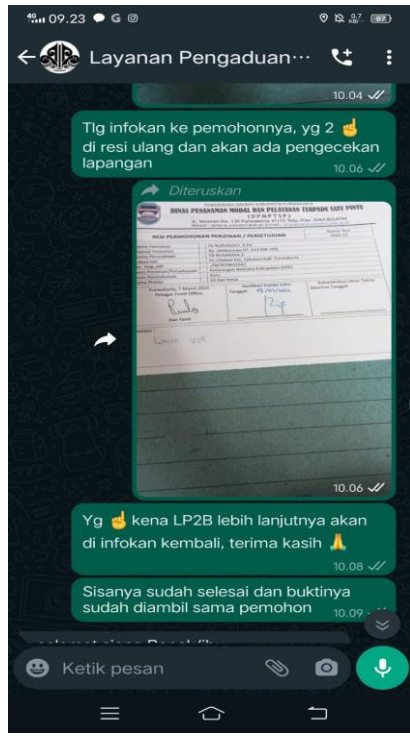
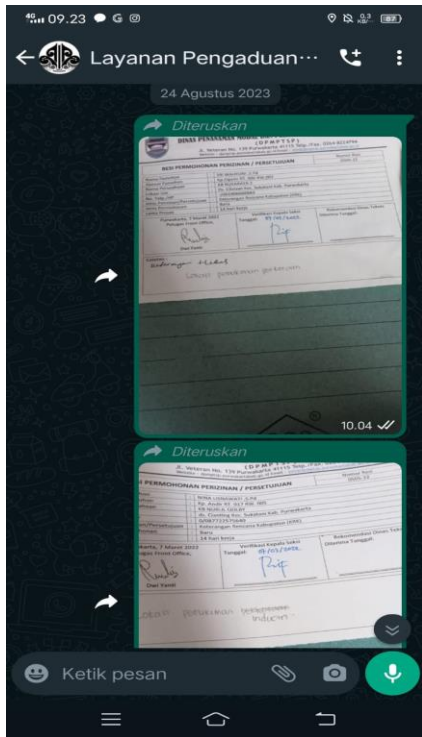
R 1/8 2023



**DOKUMENTASI GARDU PASTI  
MENERIMA PENGADUAN PESAN SINGKAT WHATSAPP  
PERIHAL IZIN OPERASIONAL YAYASAN  
( 14 AGUSTUS 2023 )**







**DOKUMENTASI ULASAN GOOGLE MPP BALE MADUKARA  
( SENIN, 21 AGUSTUS 2023 )**



**Desi Pitriani**

1 ulasan



★☆☆☆☆ 2 bulan lalu

sistem pelayanan lambat slow respon.



Suka

**MENERIMA PENGADUAN DARI SDR. ASEP JAMALUDIN  
TERKAIT PELAYANAN BEA CUKAI DI MPP BALE MADUKARA  
(28 AGUSTUS 2023)**

**FORMULIR PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI**

**DATA PEMBERI ADUAN**

Nama : Asep Jamaludin  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat Rumah : Ko. Gandaria Rt 17/08  
Dk. Nagrak  
 Pekerjaan/Instansi : Kemahasiswaan PUPP  
 Alamat Kantor : Jln. A.H. Nasution, Bunchung  
 Email : asep.jamaludin@pupp.ac.id  
 No. KTP : 3219610098000  
 No. Telp : 08772933559

**JENIS PENGADUAN**

Jenis Aduan/Uraian : Srt keter lampiran masuk  
gmn kerja dan pelayanan d  
tempat produksi smk  
konvensional Bea Cukai

Tujuan Pengaduan : Awar di tunjukkan lagi pncanaan

Sumber Informasi : \_\_\_\_\_

Data Pendukung :  Ya (dilampirkan dengan dokumen asli)  
 Tidak

Cara Menyampaikan Aduan :  Diserahkan langsung  
 Kurir  
 Pos  
 E-mail  
 Faksimili

Purwakarta, 28 Agustus 2023

Petugas Penerima : \_\_\_\_\_ Pemberi Aduan : Asep Jamaludin

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
[DPMPTSP]**

Jl. Veteran No. 119 Purwakarta 41115  
Telp/Fax (0264) 8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari : Perwakilan Diterima Tgl : 28 Agustus 2023  
 No. Agenda : 231  
 No. Surat : \_\_\_\_\_ Sifat : \_\_\_\_\_  
 Tgl. Surat : 28 Agustus 2023  Sangat Segera  Segera  Baik  Bawa

Perihal : Pengaduan terhadap Pelayanan & Investasi

Diteruskan kepada saudara :  Sekretaris  Tanggapan dan Saran  
 Ketua Tim Pengaduan  Proses Lebih Lanjut  
 SP \_\_\_\_\_  Koordinasi/Konfirmasi

Kasubag Keuangan \_\_\_\_\_  
 Sdr / Sdri \_\_\_\_\_

Catatan : \_\_\_\_\_

Yth B' L. Iyza (Kata Pengaduan)  
1 spt B' K. H. K. L. Iyza 28/08/23  
KH

Indeks : PM Kode : PM No. Unit : 595

Perihal : Pengaduan terhadap Pelayanan & Investasi

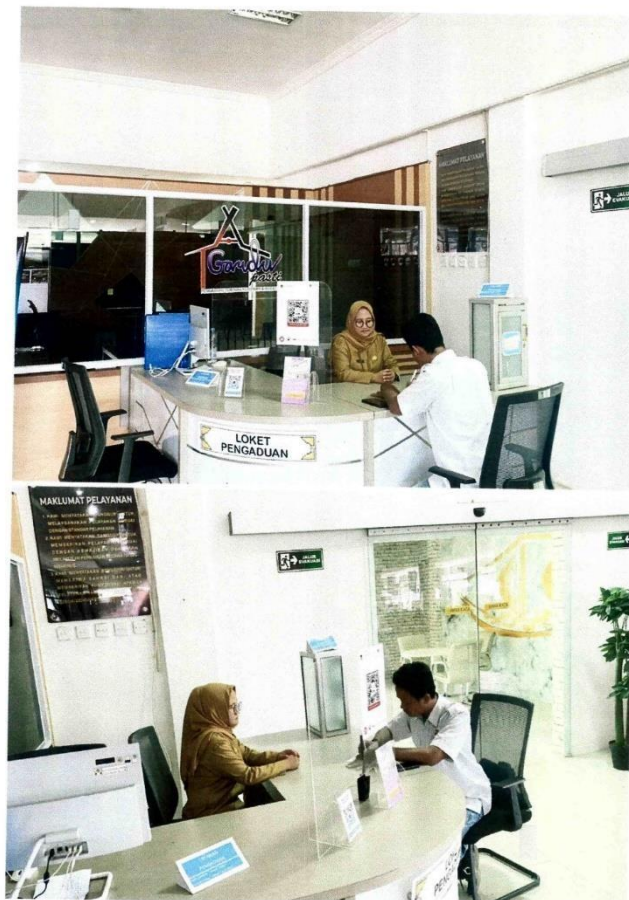
Isi Ringkas : Pengaduan Terhadap Pelayanan & Investasi

Dari : Perwakilan (Asep Jamaludin)

Tanggal surat : \_\_\_\_\_ No. Surat : \_\_\_\_\_ Lampiran : \_\_\_\_\_

Pengolah : Ketua Tim Pengaduan Tgl. Diteruskan : 28 8 2023 Tanda terima : 57

Catatan : \_\_\_\_\_





**BUKTI TINDAK LANJUT PENYAMPAIAN SURAT PENGADUAN PELAYANAN  
KE TENAN BEA CUKAI DARI SDR. ASEP JAMALUDIN TERKAIT PELAYANAN BEA  
CUKAIDI MPP BALE MADUKARA  
(28 AGUSTUS 2023)**





**KUNJUNGAN DPRD KOMISI 1  
TERKAIT KELANJUTAN PERMASALAHAN CV. SOLVI  
INDONESIARUANG RAPAT DPMPTSP  
(28 AGUSTUS 2023)**



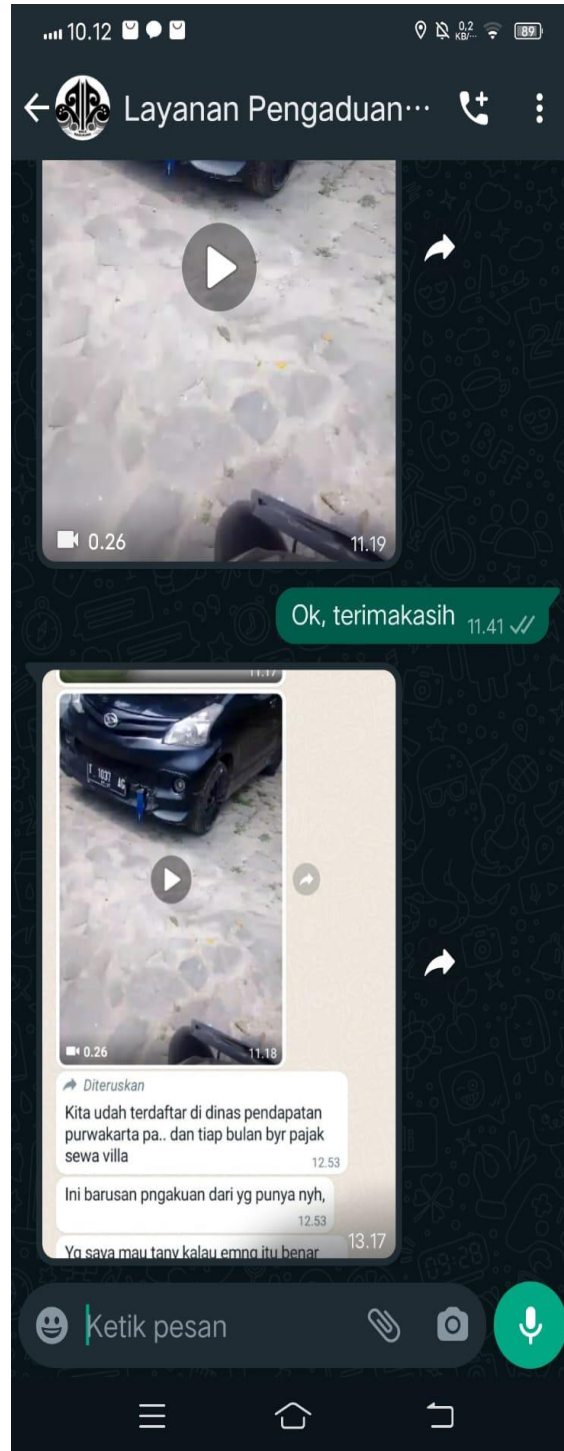
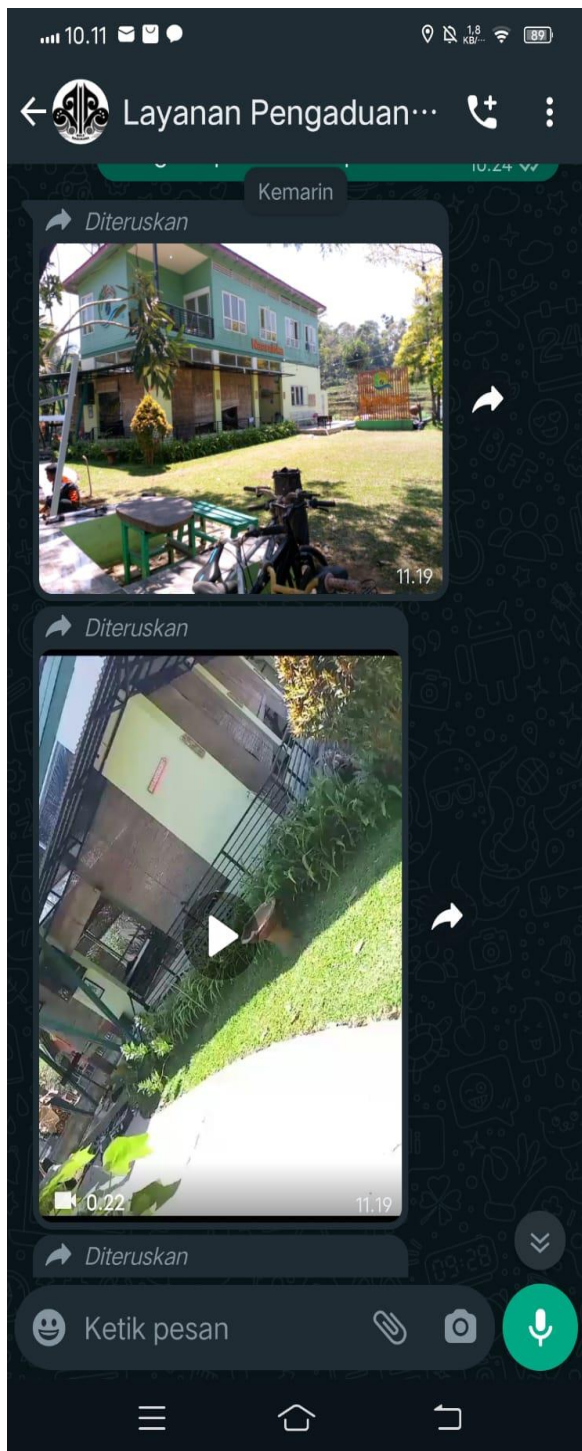


**DOKUMENTASI MENERIMA PENGADUAN DARI BAPAK BUDIMAN  
PERIHAL ADANYA KEBISINGAN DI VILLA NARALOKA YANG MENGGANGGU WARGA MASYARAKAT  
BERLOKASI DI KP. PENTAS RT. 04 RW. 02  
DESA SAKAMBANG KECAMATAN PURWAKARTA**

**( 30 AGUSTUS 2023 )**



**DOKUMENTASI PENDUKUNG  
PERIHAL ADANYA KEBISINGAN DI VILLA NARALOKA  
BERLOKASI DI KP. PENTAS RT. 04 RW. 02  
DESA SAKAMBANG KECAMATAN PURWAKARTA  
( 7 SEPTEMBER 2023 )**





# TINDAKLANJUT ADANYA KEBISINGAN DI VILLA NARALOKA MENYAMPAIKAN SURAT KE OPD TEKNIS ( 13 SEPTEMBER 2023 )



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(D.P.M.P.T.S.P.)  
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41119  
Telp./Faks. 0264-824794 Email: info@dinasmmd.purwakartab.go.id  
Website : www.dpmptsp.purwakartab.go.id

Purwakarta, 13 September 2023

Nomor : PW.04.02/961.040/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 3 Berkas  
Perihal : Tindak lanjut Pengaduan Villa Naraloka

Kepada Yth.  
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta  
di

PURWAKARTA

Ditampilkan dengan hormat, menindaklanjuti Pengaduan Sdr. Budiman pada tanggal 5 September 2023 melalui Kanal Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi (Gerdu Pasli) Perihal adanya kebisingan atau kegadisan di Villa Naraloka dan diduga bangunan tersebut belum memiliki izin Perizinan Bangunan Gedung (PBG) serta belum mendapatkan izin dari warga sekitar yang berlokasi di Kp. Pentas Rt.04 RW. 02 Desa Sakambang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Kami menyarankan kepada pemohon/pengadu agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat kewilayahan (kacamatan dan desa) terkait dengan sebarang yang terjadi dan untuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengecekan terakali hal tersebut.

Berdasarkan :

1. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertibatan, Ketertibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 8 Ayat (2) bahwa Penyelenggaraan ketertibatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Bupati Purwakarta No. 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 208, dimana :
  - 1) Penerbitan Bangunan Gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan dengan tahapan :
    - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, dan
    - b. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
  - 2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan ditembakkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Perintah pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.

Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

4. Perintah pembongkaran bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan surat perintah pembongkaran bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan ditembakkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor: 118 Tahun 2018 tentang Pen dele gasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 6 ayat (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPISIP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

Sehubungan dengan Peraturan diatas kami harapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat bertindak lanjut permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Sebagai bahan pelaporan kami lampirkan bukti formulir pengaduan dan foto bangunan yang dipermasalahkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Camat Wanayasa

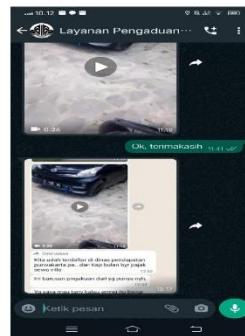
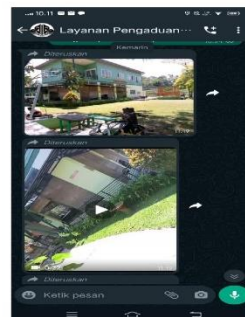
Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

### DOKUMENTASI MENERIMA PENGADUAN DARI BAPAK BUDIMAN PERHAL ADANYA KEBISINGAN DI VILLA NARALOKA YANG DIDUGA BELUM MEMILIKI PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BERLOKASI DI KP. PENTAS RT. 04 RW. 02 DESA SAKAMBAING KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA ( 30 AGUSTUS 2023 )



Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

### DOKUMENTASI PENDUKUNG



Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

# TINDAKLANJUT DARI SATPOL PP INSPEKSI LAPANGAN KE VILLA NARALOKA ( 20 SEPTEMBER 2023 )



Purwokerto, 20 September 2023

Kepada  
Yth: Kepala Dinas Perumahan, Modal dan  
Peningkatan Kualitas Kota Purwokerto

Ditindak Lanjut Villa Naraloka

### PURWAKARTA

Diusulkan dengan format rekomendasi: Surat Kepala DPMPTSP Nomor PW.04.2081/Deleas/2023 perihal Tindak lanjut Pengaduan Villa Naraloka tanggal 13 September 2023 dengan isi kami sampaikan hasil monitoring dan pengamatan terhadap Villa Naraloka tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

1. Sesuai yang tertera pada Villa Naraloka terdapat 1 (satu) Tenda Beralas.
2. Peta perkotaan bangunan tersebut di lokasi tersebut sesuai dengan zonasi villa (perumahan) dengan status bangunan dan status pemukiman.
3. Kegiatan usaha sebagaimana tertera pada lokasi tersebut adalah C2 (Komersial).
4. Tercatat 2 (dua) bangunan baru, terdapat yang tidak memiliki S/1, dan yang telah dimiliki pada Surat Izin Bangun Purwokerto Nomor 503/IB/S/2019/BMPTSP/2019 tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana tertera; dan
5. Diberikan kepada pemilik usaha untuk melengkapi dokumen dan persyaratan perizinan.

Selanjutnya dengan instruksi di atas, kami harapkan Dinas Perumahan Modal dan Peningkatan Kualitas Kota Purwokerto, Kabupaten Purwokerto dapat melaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA

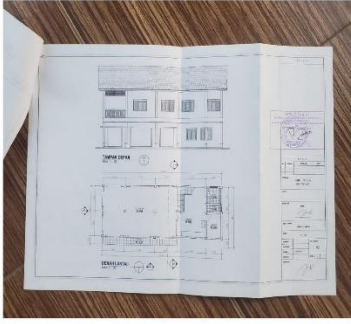
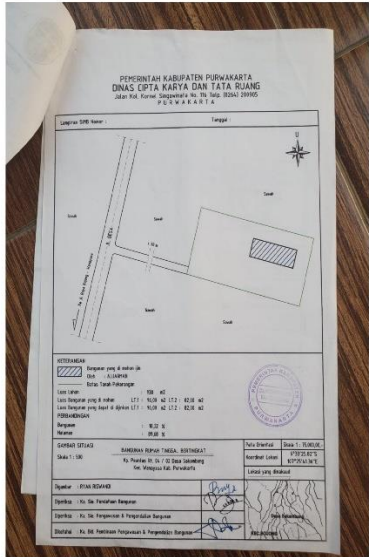
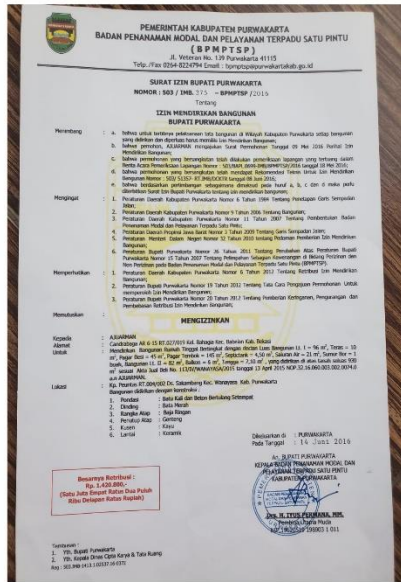
(Tanda Tangan dan Stempel)

### DOKUMENTASI PERIZINAN YANG SUDAH DIMILIKI



Tertulis, dibacakan kepada Yth:  
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwokerto.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini akan dibagikan secara elektronik yang dapat diakses di: [bbk@pura.purwokerto.go.id](mailto:bbk@pura.purwokerto.go.id)



### DOKUMENTASI KEGIATAN:



**MENYAMPAIKAN SURAT HASIL TINDAKLANJUT KEPADA SDR. M. SULAEMAN  
SEBAGAI PIHAK PENGADU  
( 20 SEPTEMBER 2023 )**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( D P M P T S P )**  
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115  
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : [info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id](mailto:info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id)  
Website : [www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id](http://www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id)

Purwakarta, 20 September 2023

Nomor : PW.04.02/890-Dalaks/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pengaduan  
Villa Naraloka

Kepada Yth.  
Bapak Budiman  
Kp. Pentas RT.04/02 Desa Sakambang  
Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta.

di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Pengaduan dari saudara mengenai adanya kebisingan atau kegiatan di Villa Naraloka dan diduga bangunan tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta belum mendapatkan izin dari warga sekitar yang berlokasi di Kp. Pentas RT.04 RW. 02 Desa Sakambang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Dinas teknis terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan no surat : PW.04.02/861-Dalaks/2023 tanggal 13 September 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Disampaikan secara elektronik dari:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARIMAN BUKHANGGORO, ST.,MT  
Pembina TK. I / IV b

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
2. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Camat Wanayasa

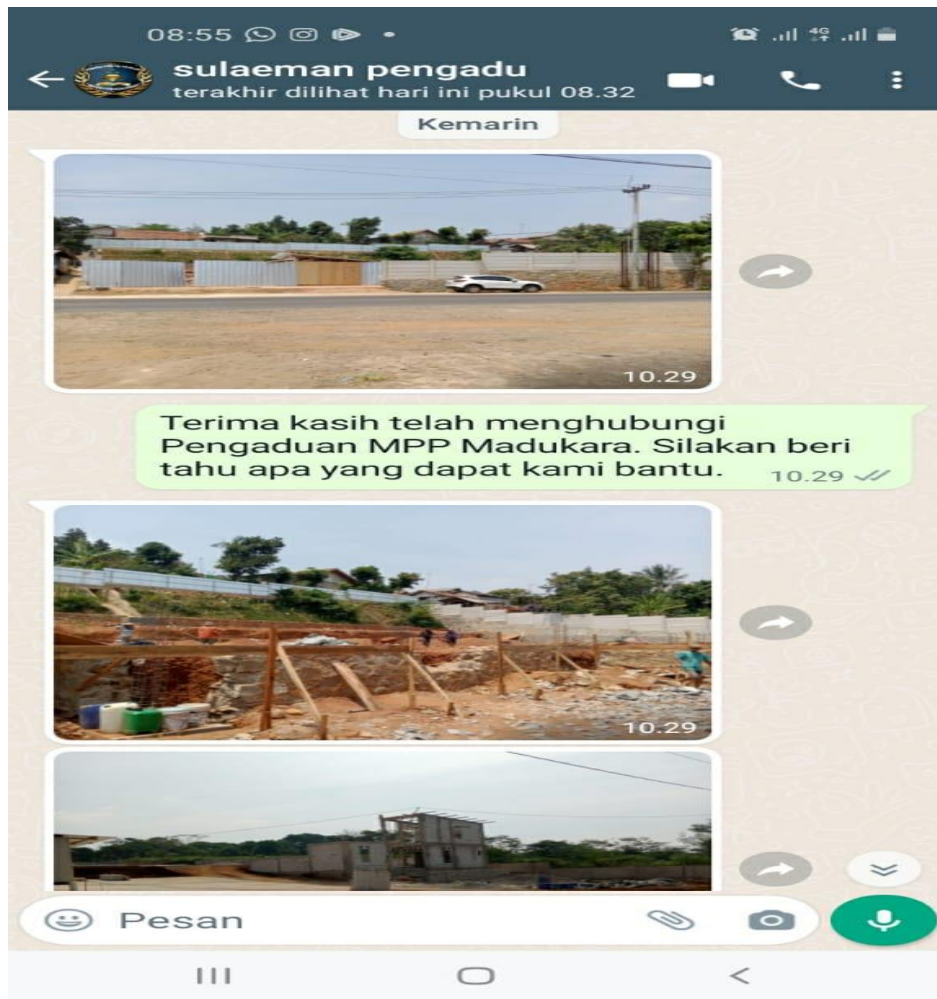
Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**DOKUMENTASI GARDU PASTI  
MENERIMA PENGADUAN DARI SDR. SULAEMAN  
PERIHAL DUGAAN ADANYA PROYEK GUDANG BUAH MANGGIS YANG  
BELUM MENGANTONGI IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)  
( 5 SEPTEMBER 2023 )**



**DATA PENDUKUNG**  
**PERIHAL DUGAAN ADANYA PROYEK GUDANG BUAH MANGGIS YANG**  
**BELUM MENGANTONGI IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)**  
**( 5 SEPTEMBER 2023 )**





**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT PENJELASAN DARI DPUTR  
PERIHAL DUGAAN ADANYA PROYEK GUDANG BUAH MANGGIS YANG BELUM  
MENGANTONGI IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)  
DI MPP BALE MADUKARA  
( 5 SEPTEMBER 2023 )**



# TINDAKLANJUT ADANYA PROYEK GUDANG BUAH MANGGIS YANG BELUM MENGANTONGI IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) MENYAMPAIKAN SURAT KE OPD TEKNIS ( 13 SEPTEMBER 2023 )



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )  
Jalan Veteran Nomor 139 Purwokerto 41115  
Telp/Faks : (024) 8274794 Email : info@dinaspmptsp.purwakartabab.go.id  
Website : www.dinaspmptsp.purwakartabab.go.id

Purwokerto, 13 September 2023

Kepada Yth,  
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwokerto,  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwokerto  
di-

PURWAKARTA

Diampikan dengan hormat, merindukanjuti Pengaduan dari Sdr. M. Suleman pada tanggal 5 September 2023 melalui Kanal Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi (Gandu Pasti) Perihal adanyu pembangunan proyek gudang buah manggis yang belum memiliki izin Peretujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Kp. Nanggaleng RT.03/RW.001 Desa Depok Kecamatan Darangtira Kabupaten Purwokarta.

- Berdasarkan :
- Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwokarta No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kotacodaman, Kotabintan Umum dan Perindagan Masyarakat Pasal 8 Ayat (2) bahwa Penyelenggaraan ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
  - Peraturan Bupati Purwokarta No. 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 208, dimana :
    - Perizinan Bangunan Gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan dengan tahapan :
      - peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, dan
      - perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
    - Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan ditembuskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
  - Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
  - Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan surat perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh

Dokumen ini telah di sandiungani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan dan ditembuskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 6 ayat (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

Sehubungan dengan Peraturan diatas kami haraskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat menindak lanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan wewenangnya. Sebagai bahan pelaporan kami lampirkan bukti formulir pengaduan dan foto bangunan yang dipermasalahkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Purwokarta
- Sekretaris Daerah Kabupaten Purwokarta
- Camat Darangtira

Dokumen ini telah di sandiungani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DOKUMENTASI MENGENAI PENGADUAN DARI Sdr. M. SULEMAN PERHAL ADANYA PEMBANGUNAN GUDANG BUAH MANGGIS YANG BELUM MEMILIKI IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BERLOKASI DI KP. Nanggaleng RT.03/RW.001 DESA DEPOK, KEC. DARANGTIRA KAB. PURWAKARTA (5 SEPTEMBER 2023)**



Dokumen ini telah di sandiungani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

### DOKUMENTASI PERIKUNG



Dokumen ini telah di sandiungani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

# TINDAKLANJUT DARI SATPOL PP INSPEKSI LAPANGAN KE PROYEK GUDANG BUAH MANGGIS ( 20 SEPTEMBER 2023 )



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Gardanegara Nomor 29 Purwakarta (41111) Telp / Fax. (0264) 8393886  
PURWAKARTA

Purwakarta, 20 September 2023

Nomor : PW.04.03/1293-SatpolPP/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Tindak Lanjut Pembangunan Gudang Manggis**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di-  
**PURWAKARTA**

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala DPMTSP Nomor PW.04.02/862-Delaks/2023 perihal Tindaklanjuti Pengaduan Pembangunan Gudang Manggis tanggal 13 September 2023, dengan ini kami sampaikan hasil monitoring dan pengawasan terhadap Pembangunan Gudang Manggis tanggal 19 September 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan Gudang Manggis yang terletak di Jl Mokter Desa Darangdan, Kecamatan Darangdan tidak ditemukan kegiatan / aktifitas pembangunan (gerbang digembok);
2. Bahwa berdasar keterangan dan pengawasan unsur kewilayahan (Kecamatan Darangdan) kegiatan pembangunan gudang manggis belum memiliki izin sehingga dihimbau untuk dihentikan sementara dan menyelesaikan perizinannya.

Sehubungan dengan keterangan di atas, kami harapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Purwakarta dapat menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA



Disampaikan secara elektronik oleh:  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
ALIA PRATANDAS, S.T.,M.Si  
Pimpinan: 01/18

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

## DOKUMENTASI KEGIATAN:





**MENYAMPAIKAN SURAT HASIL TINDAKLANJUT KEPADA SDR. M. SULAEMAN  
SEBAGAI PIHAK PENGADU  
( 20 SEPTEMBER 2023 )**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )  
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115  
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : [info@dpmpptsp.purwarkartakab.go.id](mailto:info@dpmpptsp.purwarkartakab.go.id)  
Website : [www.dpmpptsp.purwarkartakab.go.id](http://www.dpmpptsp.purwarkartakab.go.id)

Purwakarta, 20 September 2023

Nomor	: PW.04.02/891-Dalaks/2023	Kepada Yth.
Sifat	: Biasa	Bapak M. Sulaeman
Lampiran	: -	Kp. Nanggaleng RT.03/001 Desa Depok
Perihal	: Pengaduan Pembangunan Proyek Gudang Buah Manggis	Kec. Darangdan Kab. Purwakarta di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan dari saudara mengenai dugaan pembangunan proyek gudang buah manggis yang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Kp. Nanggaleng RT.03/RW.001 Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Dinas teknis terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan no surat : PW.04.02/862-Dalaks/2023 tanggal 13 September 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Disandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARIMAN SUJI ANGGORO, ST, MT  
Pembina Tk. I / IV b

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
2. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Camat Darangdan

Dokumen ini telah di tandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di berikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DOKUMENTASI GARDU PASTI**  
**MENERIMA PENGADUAN BERITA ONLINE DARI MEDIA MITRA HUKUM BHAYANGKARA**  
**PERIHAL ADANYA TEMPAT PENGELOLAAN LIMBAH BULU AYAM YANG DIDUGA BELUM MEMILIKI**  
**IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN INSTALASI PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)**  
**LOKASI DESA DEPOK KECAMATAN DARANGDAN**  
**( 19 SEPTEMBER 2023 )**



Beranda > Berita >

Berita

## Di Duga Kuat Tak Kantongi Ijin Dan Dikeluhkan Warga Tempat Pengelolaan Limbah Bulu Ayam Tetap Beroperasi Dinas Terkait Tutup Mata

Redaksi  
September 17, 2023



Purwakarta – mediamitrahukumbhayangkara.com  
Keberadaan tempat pengelolaan limbah bulu ayam dikeluhkan warga Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, Minggu, (17/09/2023).

Pasalnya tempat tersebut menimbulkan bau busuk yang sangat mengganggu pernapasan (kesehatan).

Tempatnya berlokasi di wilayah Desa Depok Kecamatan Darangdan.

Diduga kuat tempat itu tidak memiliki ijin PGB (Persetujuan Bangunan Gedung) dan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah).

WD (21) salah satu warga mengatakan jika bau busuk yang ditimbulkan tempat pengelolaan bulu ayam itu sangat lah mengganggu, bisa sampai menyebabkan gangguan pernapasan. Jika terus dibiarkan akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

“Sebagai warga saya sangat merasa terganggu dengan kegiatan itu.

“Kami hanya ingin lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman”Jelasnya.

**Baca Juga** [Gubernur Ganjar Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Brebes Dan Berikan Bantuan](#)

Ditemui di Sekretariatnya Agus Ormas GEMPA DPD Purwakarta sangat menyayangkan dengan adanya tempat yang diduga kuat tanpa ijin dan sangat dikeluhkan warga tersebut.

“Bau busuk yang menyengat sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat.

Agus juga menambahkan jika Dinas terkait jangan tutup mata dengan tempat-tempat seperti itu. Harusnya langsung ambil tindakan bila perlu langsung ditutup saja.

“Dampaknya jelas sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Maka dari itu kami dari Ormas GEMPA meminta Dinas terkait untuk segera mungkin menghentikan kegiatan atau menutup tempat tersebut”tegasnya.

**Berikutnya**

Berita

## Di Duga Kuat Tak Kantongi Ijin Dan Dikeluhkan Warga Tempat Pengelolaan Limbah Bulu Ayam Tetap Beroperasi Dinas Terkait Tutup Mata

Redaksi  
September 17, 2023



Sementara itu pihak pengelola dan Dinas terkait belum bisa dikonfirmasi.

**Sebelumnya**

# TINDAKLANJUT ADANYA PENGELOLAAN LIMBAH BULU AYAM YANG DIDUGA BELUM MENGANTONGI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MENYAMPAIKAN SURAT KE OPD TEKNIS ( 13 SEPTEMBER 2023 )



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( D P M P T S P )  
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax: 0264-8224794  
Website : dmpptp.purwakartakab.go.id Email : info@dmpptp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 27 September 2023

Nomor : PW.04.02/921-DAI/KS/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Tindaklanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah Bulu Ayam

Kepada Yth:  
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta  
di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Kanal Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi (Gardu Pasi) pada Tanggal 19 September 2023 terkait pemberitaan online dari Media Mitra Hukum Bhayangkara, perihal adanya keluhan warga terhadap bau menyengat dari tempat pengelolaan limbah bulu ayam dan belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan :

- Peraturan Bupati Purwakarta No. 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (3) huruf d) yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas pencogahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah; dan huruf e) pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 8 Ayat (2) bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Purwakarta No. 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 208:  
Ayat (1) Pemertiban Bangunan Gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan dengan tahapan:
  - peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Ayat (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan diterbitkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) dilakukan apabila pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga.
- Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) dilakukan dengan surat perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan diterbitkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penделegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 6 ayat (1) dimana dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami harapkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat merindak lanjut permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Sebagai bahan laporan kami lampirkan bukti pengaduan yang diproses/dialihkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Tersampul ditandatangani sebagai:

- Yth: Bp Bupati Purwakarta
- Yth: Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- Yth: Camat Darangdan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara.



## DOKUMENTASI ULASAN GOOGLE MPP BALE MADUKARA ( SELASA, 27 SEPTEMBER 2023 )



**tya**

6 ulasan · 1 foto



★★★★★ 2 minggu lalu

**BARU**

Pertama kali kesini dan gamau lagi, satpamnya suka pegang2. Kapok, service no attitude 🤬

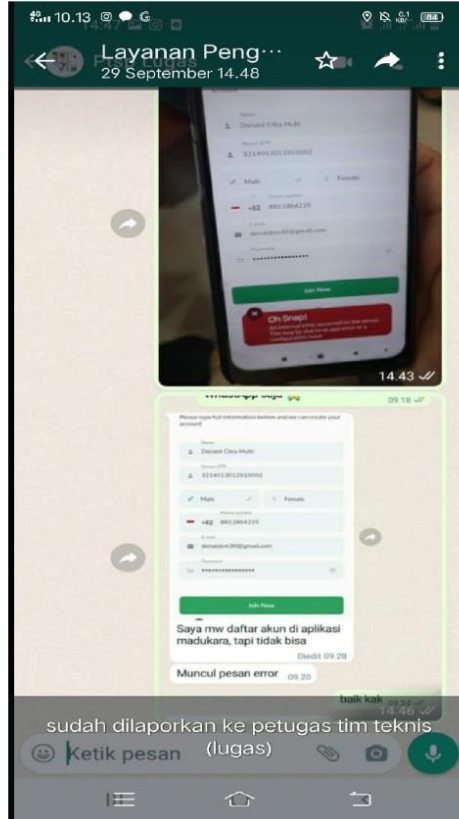


1

---

**DOKUMENTASI GARDU PASTI  
MENERIMA PENGADUAN PESAN SINGKAT WHATSAPP  
DAFTAR AKUN DI APLIKASI MADUKARA**

**( 29 SEPTEMBER 2023 )**



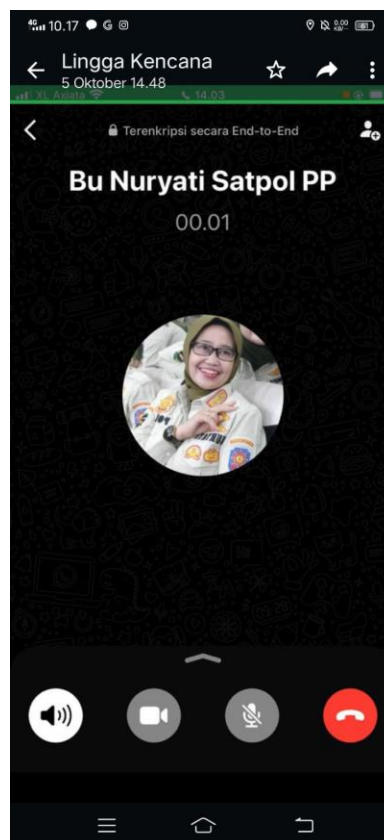
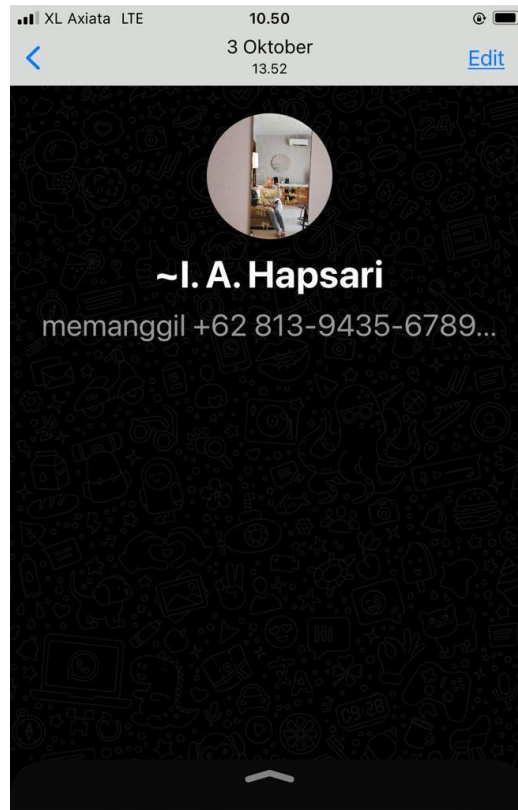
**DOKUMENTASI PENANGANAN  
PENGADUAN PERIZINAN  
TRIWULAN IV  
(OKTOBER - DESEMBER)  
TAHUN 2023**

**TINDAKLANJUT TERKAIT KRK YAYASAN AN. KB NUSARAYA DAN  
IZIN OPERASIONAL AN. KB NURUL QOLBY  
KEPADA SDR. SRI WAHYUNI SEBAGAI PIHAK PENGADU  
( 02 OKTOBER 2023 )**





**HASIL KOORDINASI DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SATPOL PP  
PERIHAL PENGADUAN LIMBAH BULU AYAM DAN KEJELASAN KEWENANGAN OPD TEKNIS  
VIA TELEPON SELULER  
( 3 DAN 5 OKTOBER 2023 )**





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmpstp.purwaktakab.go.id Email : info@dpmpstp.purwaktakab.go.id

Purwakarta, 3 Oktober 2023

Nomor : PW.04.02/936-DALAKS/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pengaduan Pengelolaan Limbah  
Bulu Ayam

Kepada Yth.  
Bapak M. Sulaeman  
Kp. Nanggaleng RT.03/001 Desa Depok  
Kec. Darangdan Kab. Purwakarta  
di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan dari saudara pada pemberitaan online di Media Mitra Hukum Bhayangkara mengenai keluhan warga terhadap bau menyengat dari tempat pengelolaan limbah bulu ayam dan belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Dinas teknis terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan no surat : PW.04.02/921-DALKS/2023 tanggal 27 September 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Disampaikan secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARMAN BUDIANDORO, ST.MT  
Pangkat II, 17/10/23

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Camat Darangdan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**FORM PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI**  
**PERIHAL DUGAAN ADANYA PROYEK PEMBANGUNAN TOWER SINYAL INTERNET**  
**DI DESA DEPOK KP. NANGGELENG KEC. DARANGDAN YANG BELUM MEMILIKI**  
**IZIN**

**( 27 OKTOBER 2023 )**

### FORM PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI

Email \*

muhamadsulaeman64@gmail.com

Instansi Tujuan Pengaduan \*

DPMPPTSP Purwakarta (Pengaduan Terkait Perizinan & Penanaman Modal)

MPP Balei Madukara (Pengaduan Pelayanan Tenan/tenant di Balei Madukara)

GPP Teras Madukara (Pengaduan Pelayanan Publik di Teras Madukara)

Jenis Pengaduan \*

Perizinan dan Non Perizinan

Penanaman Modal

Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Wewenang

Pungutan Liar

Lainnya

Nama Lengkap \*

Muhamad Sulaeman

Nomor Induk Kependudukan (NIK) \*

3214066302890001

Nomor HP/Telepon \*

087727607728

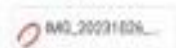
Alamat Lengkap \*

Muhamad Sulaiman

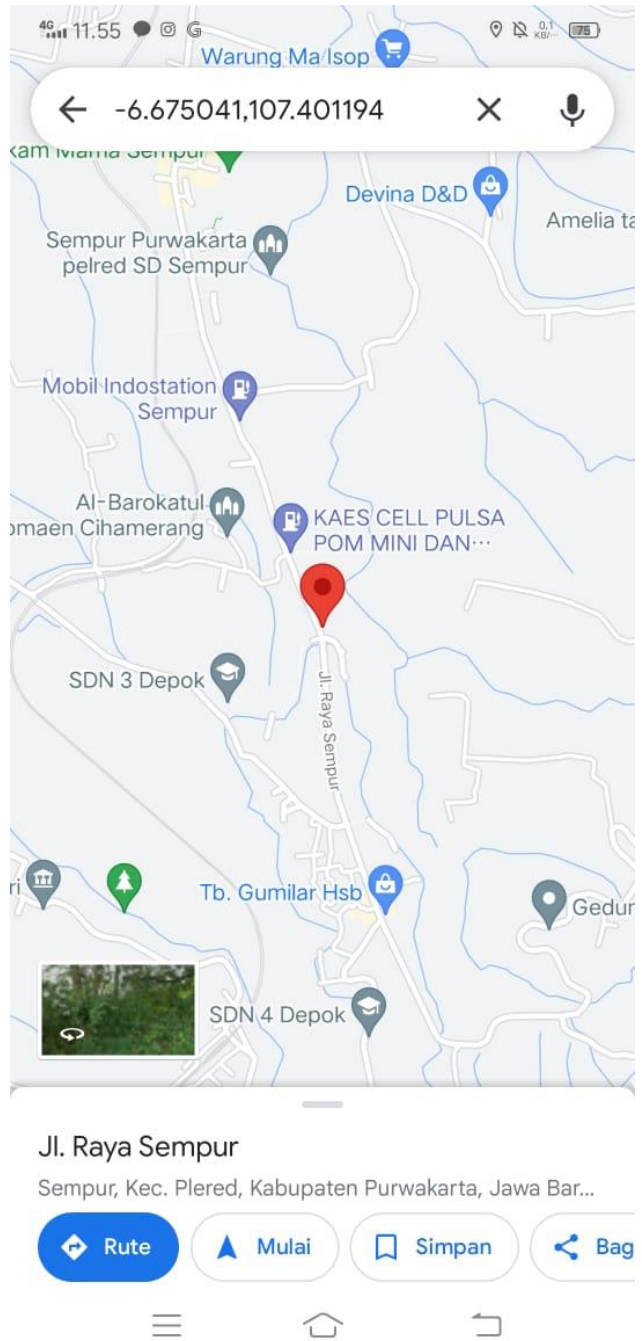
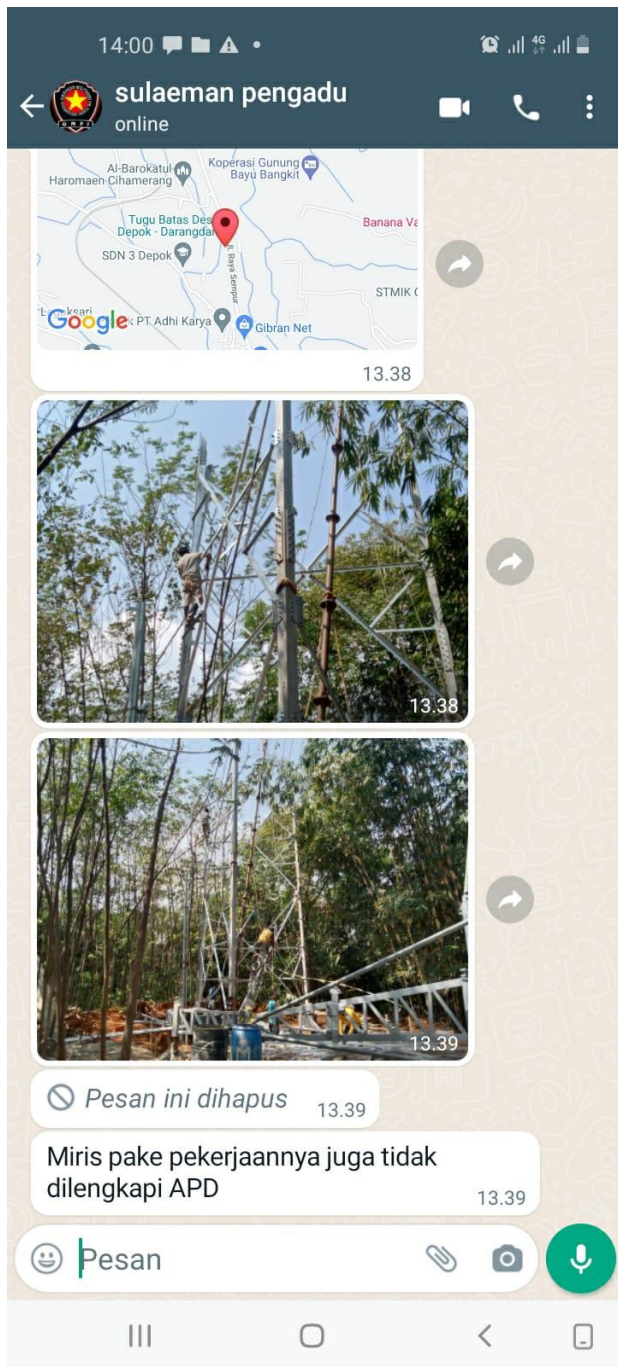
Deskripsi Pengaduan \*

Di Duga pembangunan tower sinyal internet di wilayah Desa Depok kampung nangkring tidak memiliki ijin

Foto Pengaduan \*









PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwarkartakab.go.id

Purwakarta, 6 November 2023

Nomor : PW.04.02/1080-Dalaks/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pengaduan Proyek Pembangunan  
Tower

Kepada Yth.  
Bapak M. Sulaeman  
Kp. Nanggaleng RT.03/001 Desa Depok  
Kec. Darangdan Kab. Purwakarta

di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan dari saudara melalui Kanal Form Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi (Gardu Pasti) terkait adanya dugaan proyek pembangunan tower yang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Kp. Nanggaleng Desa Depok Kecamatan Darangdan. Berdasarkan data yang kami miliki bahwa lokasi tower tersebut belum memiliki izin dan telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Dinas teknis terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan no surat : PW.04.02/1069-Dalaks/2023 tanggal 3 November 2023 .

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT  
Pembina Tk. I / IV b

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kabupaten Purwakarta
5. Yth. Camat Darangdan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwarkartakab.go.id

Purwakarta, 3 November 2023

Nomor : PW.04.02/1069-Dalaks/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Tindaklanjut Pengaduan Proyek  
Pembangunan Tower

Kepada Yth.  
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Tata Ruang Kabupaten  
Purwakarta

di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Kanal Form Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi (Gardu Pasti) pada Tanggal 27 Oktober 2023 dari sdr. Sulaeman terkait adanya dugaan proyek pembangunan tower yang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Kp. Nanggaleng Desa Depok Kecamatan Darangdan. Berdasarkan data yang kami miliki bahwa lokasi tower tersebut belum memiliki izin, sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 8 Ayat (2) bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
2. Peraturan Bupati Purwakarta No. 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung bahwa Penertiban Bangunan Gedung yang dibangun tanpa IMB dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi urusan tata ruang dan tata bangunan (DPUTR).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami harapkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Sebagai bahan pelaporan kami lampirkan bukti pengaduan dan foto yang dipermasalahkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARIMAN BUDI ANGORO, ST.MT  
Perbina Tk. I / IV b

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Camat Darangdan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**FORM PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI  
PERIHAL PENGELOLAAN LIMBAH BULU AYAM  
DI DESA DEPOK KP. NANGGELENG KEC. DARANGDAN**

**( 03 NOVEMBER 2023 )**

**FORM PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI**

Email \*

muhamadsulaeman664@gmail.com

Instansi Tujuan Pengaduan \*

- DPMTSP Purwakarta (Pengaduan Terkait Perizinan & Penanaman Modal)
- MPP Bale Madukara (Pengaduan Pelayanan Tenant-tenant di Bale Madukara)
- GPP Teras Madukara (Pengaduan Pelayanan Publik di Teras Madukara)

Jenis Pengaduan \*

- Perizinan dan Non Perizinan
- Penanaman Modal
- Pelayanan Publik
- Penyalahgunaan Wewenang
- Pungutan Liar
- Lainnya

Nama Lengkap \*

Muhamad Sulaeman

Nomor Induk Kependudukan (NIK) \*

3214060302890001

Nomor HP/Telepon \*

087727607728




Alamat Lengkap \*

Muhamad Sulaeman

Deskripsi Pengaduan \*

Terkait dengan adanya Tempat Pengelolaan Limbah Bulu Ayam Yang berlokasi di jalan Milliter Desa Depok Kecamatan Darangdan masyarakat Darangdan menginginkan tempat tersebut untuk di tutup karena sudah sangat membahayakan kesehatan masyarakat

Foto Pengaduan \*

 video\_20231030...





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
( D P M P T S P )

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmpstp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmpstp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 3 Oktober 2023

Nomor : PW.04.02/936-DALAKS/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pengaduan Pengelolaan Limbah  
Bulu Ayam

Kepada Yth.  
Bapak M. Sulaeman  
Kp. Nanggaleng RT.03/001 Desa Depok  
Kec. Darangdan Kab. Purwakarta  
di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan dari saudara pada pemberitaan online di Media Mitra Hukum Bhayangkara mengenai keluhan warga terhadap bau menyengat dari tempat pengelolaan limbah bulu ayam dan belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Dinas teknis terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan no surat : PW.04.02/921-DALAKS/2023 tanggal 27 September 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Disahkan secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARIMAN RUSLI ANDOORO, ST.MF  
No.0264/15.1/13/3

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Camat Darangdan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwarkartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwarkartakab.go.id

Purwakarta, 27 September 2023

Nomor : PW.04.02/921-DALKS/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Tindaklanjut Pengaduan Pengelolaan  
Limbah Bulu Ayam

Kepada Yth.  
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta  
di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Kanal Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi (Gardu Pasti) pada Tanggal 19 September 2023 terkait pemberitaan online dari Media Mitra Hukum Bhayangkara, perihal adanya keluhan warga terhadap bau menyengat dari tempat pengelolaan limbah bulu ayam dan belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Purwakarta No. 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (3) huruf © yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah; dan huruf (e) pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 8 Ayat (2) bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Bupati Purwakarta No. 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 208 ;  
Ayat (1) Penertiban Bangunan Gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan dengan tahapan :
  - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - b. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**PENGADUAN TERPADU PERIZINAN DAN INVESTASI**  
**PERIHAL APLIKASI GASPOL**  
**MPP BALE MADUKARA**

**( 06 NOVEMBER 2023 )**

**FORM PENGADUAN TERPADU PERIZINAN & INVESTASI**

Email \*

titaans@gmail.com

Instansi Tujuan Pengaduan \*

- DPMTSP Purwakarta (Pengaduan Terkait Perizinan & Penanaman Modal)
- MPP Bale Madukara (Pengaduan Pelayanan Tenant-tenant di Bale Madukara)
- GPP Teras Madukara (Pengaduan Pelayanan Publik di Teras Madukara)

Jenis Pengaduan \*

- Perizinan dan Non Perizinan
- Penanaman Modal
- Pelayanan Publik
- Penyalahgunaan Wewenang
- Pungutan Liar
- Lainnya

Nama Lengkap \*

T\*\* N\*\*\*\*\*

Nomor Induk Kependudukan (NIK) \*

321410

Nomor HP/Telepon \*

081224848711



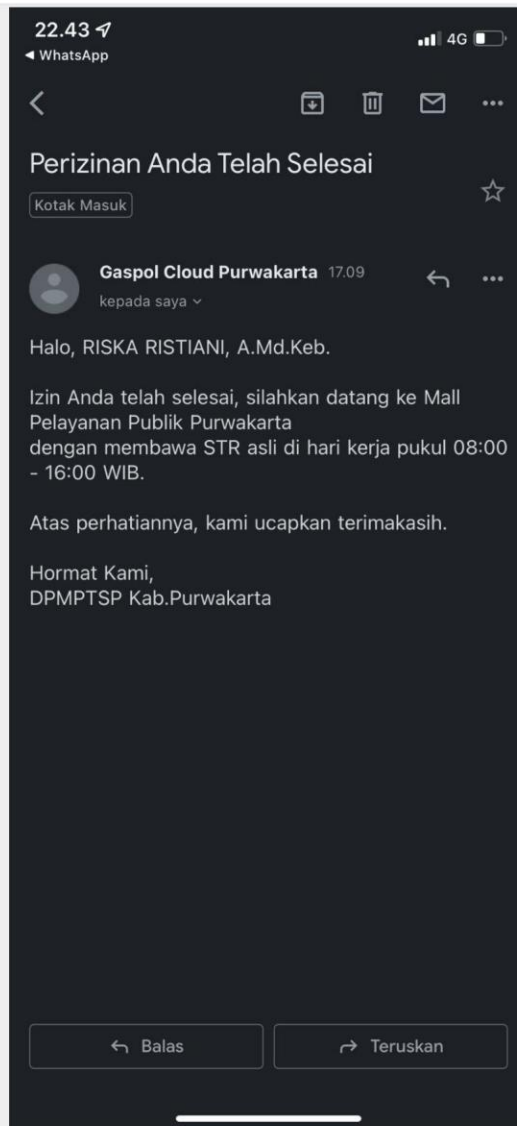
Alamat Lengkap \*

Purwakarta

Deskripsi Pengaduan \*

Perizinan SIP telah selesai proses di aplikasi gaspol, tetapi setelah selesai mendapatkan email untuk datang mengunjungi MPP Purwakarta. Setelah sampai MPP, baru dijelaskan kembali jika SIP yang telah selesai bisa di cetak langsung oleh masing masing akun. Diharapkan, DPMPPTSP mengubah deskripsi isi email agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Foto Pengaduan \*

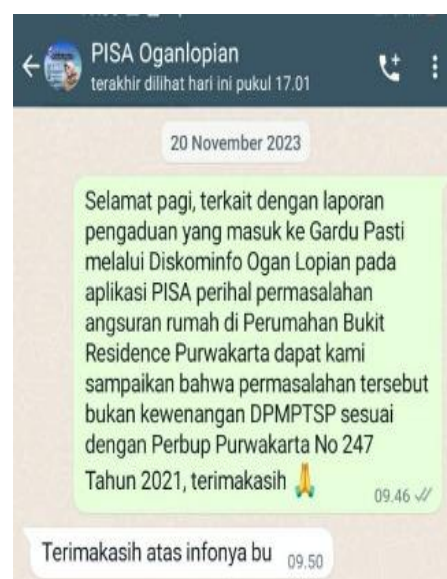
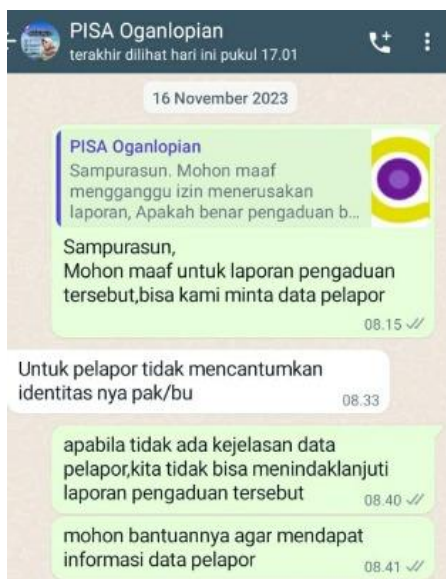
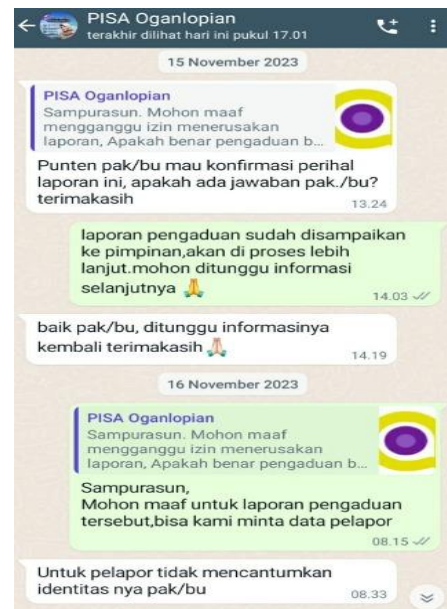


# DOKUMENTASI GARDU PASTI

## MENERIMA PENGADUAN DARI APLIKASI PISA OGAN LOPIAN PURWAKARTA

### PERIHAL PEMBAYARAN ANGSURAN RUMAH DI PERUMAHAN BUKIT RESIDENCE PURWAKARTA

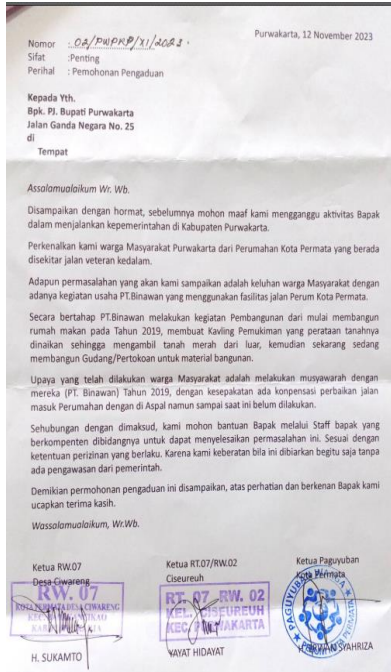
( 14 NOVEMBER 2023 )



# DOKUMENTASI GARDU PASTI

## MENERIMA SURAT PERMOHONAN PENGADUAN KEPADA PT. BINAWAN DARI WARGA MASYARAKAT PERUM KOTA PERMATA TERKAIT FASILITAS JALAN PERUM KOTA PERMATA

( 14 NOVEMBER 2023 )



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
 Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
 Telp/Fax (0264) 8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

### LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Pengaduan Masyarakat Diterima Tgl : 14 November 2023  
 No. Surat : 02/PMP/PP/11/2023 No. Agenda : 001  
 Tgl. Surat : 14 November 2023 Sifat : Penting  
 Perihal : Permohonan Pengaduan

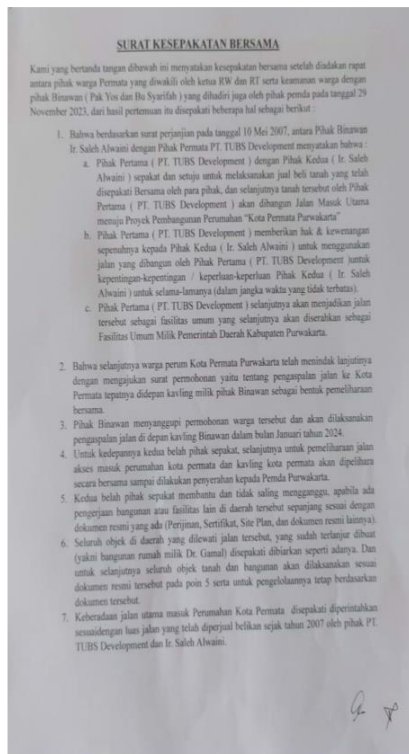
Diteruskan kepada saudara : Dengan hormat harap :  
 Sekretaris  Tanggapan dan Saran  
 Ketua Tim Pengaduan  Proses Lebih Lanjut  
 JF  Koordinasi/Konfirmasi  
 Kasubag Keuangan  
 Sdr / Sdri

Catatan :  
 1. Yth. Kepala Satpol PP Purwakarta  
 2. Yth. Kepala Dinas PUTR Purwakarta  
 3. Yth. Kepala DPM PTSP Purwakarta  
 4. Yth. Camat Purwakarta  
 5. Yth. Camat Babakanliao  
 6. Yth. Kelurahan Cibeureuh  
 7. Yth. Kepala Desa Ciwareng

# DOKUMENTASI GARDU PASTI

## HASIL TINDAKLANJUT PERMASALAHAN PENGADUAN WARGA MASYARAKAT PERUM KOTA PERMATA DENGAN PT. BINAWAN TERKAIT FASILITAS JALAN PERUM KOTA PERMATA

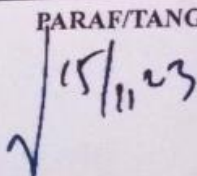
( 29 NOVEMBER 2023 )



REDMI NOTE 8

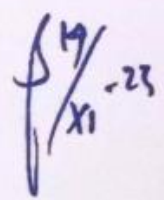


**MENERIMA PENGADUAN DARI LEMBAR DISPOSISI SEKDA PURWAKARTA  
( 16 NOVEMBER 2023 )**

<b>LEMBAR DISPOSISI SEKDA PURWAKARTA</b> <span style="float: right;">16</span>					
<b>A AGENDA NASKAH</b> Tgl. Naskah Masuk ke ..... Tgl / No. Naskah ..... Asal Naskah ..... Isi Informasi Naskah .....	<b>NO. AGENDA : 204</b> 14 Nov 2023 14 NOV 2023 / Masyarakat kec. Darangdan a/n. Agus WA Surat keberatan or Penolakan Warga.				
<b>B DITERUSKAN KEPADA :</b> <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pemerintahan  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Hukum  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  <input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD  <input type="checkbox"/> Inspektur Inspektorat Daerah  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pendidikan  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Kesehatan  <input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit Bayu Asih  <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Sosial, PP, dan Perlindungan Anak  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan  <input type="checkbox"/> Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  <input type="checkbox"/> Ka. Pel. Satuan Penanggulangan Bencana Daerah                 </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Asda Bidang Perekonomian dan Pemb  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Perekonomian dan SDA  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Administrasi Pembangunan  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Perhubungan  <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas Lingkungan Hidup  <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas PM &amp; PTSP  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  <input type="checkbox"/> Kadis. Koperasi,UKM,Perdagangan&amp;Perindustrian  <input type="checkbox"/> Kadis. Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  <input type="checkbox"/> Kepala Bapelitbangda  <b>Asda Bid. Administrasi Umum</b>  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Organisasi  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Umum  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan  <input type="checkbox"/> Kepala Badan Keuangan &amp; Aset Daerah  <input type="checkbox"/> Kepala Badan Pendapatan Daerah  <input type="checkbox"/> Kepala BKPSDM  <input type="checkbox"/> Sekretaris KPUD                 </td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pemerintahan <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Hukum <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat <input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD <input type="checkbox"/> Inspektur Inspektorat Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pendidikan <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Kesehatan <input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit Bayu Asih <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Satuan Polisi Pamong Praja <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Sosial, PP, dan Perlindungan Anak <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan <input type="checkbox"/> Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik <input type="checkbox"/> Ka. Pel. Satuan Penanggulangan Bencana Daerah	<input type="checkbox"/> Asda Bidang Perekonomian dan Pemb <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Perekonomian dan SDA <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Administrasi Pembangunan <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Perhubungan <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas Lingkungan Hidup <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas PM & PTSP <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pangan dan Pertanian <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan <input type="checkbox"/> Kadis. Koperasi,UKM,Perdagangan&Perindustrian <input type="checkbox"/> Kadis. Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi <input type="checkbox"/> Kepala Bapelitbangda <b>Asda Bid. Administrasi Umum</b> <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Organisasi <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Umum <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan <input type="checkbox"/> Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Badan Pendapatan Daerah <input type="checkbox"/> Kepala BKPSDM <input type="checkbox"/> Sekretaris KPUD		
<input checked="" type="checkbox"/> Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pemerintahan <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Hukum <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat <input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD <input type="checkbox"/> Inspektur Inspektorat Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pendidikan <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Kesehatan <input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit Bayu Asih <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Satuan Polisi Pamong Praja <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Sosial, PP, dan Perlindungan Anak <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan <input type="checkbox"/> Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik <input type="checkbox"/> Ka. Pel. Satuan Penanggulangan Bencana Daerah	<input type="checkbox"/> Asda Bidang Perekonomian dan Pemb <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Perekonomian dan SDA <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Administrasi Pembangunan <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Perhubungan <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas Lingkungan Hidup <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas PM & PTSP <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Pangan dan Pertanian <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan <input type="checkbox"/> Kadis. Koperasi,UKM,Perdagangan&Perindustrian <input type="checkbox"/> Kadis. Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika <input type="checkbox"/> Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi <input type="checkbox"/> Kepala Bapelitbangda <b>Asda Bid. Administrasi Umum</b> <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Organisasi <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Umum <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan <input type="checkbox"/> Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan <input type="checkbox"/> Kepala Badan Keuangan & Aset Daerah <input type="checkbox"/> Kepala Badan Pendapatan Daerah <input type="checkbox"/> Kepala BKPSDM <input type="checkbox"/> Sekretaris KPUD				
<b>C SIFAT :</b> <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> SEGERA</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> SANGAT RAHASIA</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> RAHASIA</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA	<input type="checkbox"/> SEGERA	<input type="checkbox"/> SANGAT RAHASIA	<input type="checkbox"/> RAHASIA
<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA	<input type="checkbox"/> SEGERA				
<input type="checkbox"/> SANGAT RAHASIA	<input type="checkbox"/> RAHASIA				
<b>D ISI DISPOSISI</b> <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Wakil / hadir / terima / Agendakan  <input checked="" type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti  <input type="checkbox"/> Pelajari/Telaah/Sarannya  <input type="checkbox"/> Untuk dikaji sesuai ketentuan yang ada  <input type="checkbox"/> ACC / Realisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada  <input type="checkbox"/> Untuk dibantu/dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan  <input type="checkbox"/> Fasilitasi/proses sesuai dengan ketentuan  <input type="checkbox"/> Monitor realisasinya / perkembangannya/Pantau  <input type="checkbox"/> Jadwalkan/Ingatkan waktunya  <input type="checkbox"/> Siapkan pointer/sambutan/bahan rapat  <input type="checkbox"/> Jawab/Koordinasi konfirmasi dengan YBS/Instansi Terkait  <input type="checkbox"/> Membaca/File/Rcferensi                 </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> .....  <input type="checkbox"/> .....  <input type="checkbox"/> .....                 </td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Wakil / hadir / terima / Agendakan <input checked="" type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> Pelajari/Telaah/Sarannya <input type="checkbox"/> Untuk dikaji sesuai ketentuan yang ada <input type="checkbox"/> ACC / Realisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada <input type="checkbox"/> Untuk dibantu/dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan <input type="checkbox"/> Fasilitasi/proses sesuai dengan ketentuan <input type="checkbox"/> Monitor realisasinya / perkembangannya/Pantau <input type="checkbox"/> Jadwalkan/Ingatkan waktunya <input type="checkbox"/> Siapkan pointer/sambutan/bahan rapat <input type="checkbox"/> Jawab/Koordinasi konfirmasi dengan YBS/Instansi Terkait <input type="checkbox"/> Membaca/File/Rcferensi	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....		
<input checked="" type="checkbox"/> Wakil / hadir / terima / Agendakan <input checked="" type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> Pelajari/Telaah/Sarannya <input type="checkbox"/> Untuk dikaji sesuai ketentuan yang ada <input type="checkbox"/> ACC / Realisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada <input type="checkbox"/> Untuk dibantu/dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan <input type="checkbox"/> Fasilitasi/proses sesuai dengan ketentuan <input type="checkbox"/> Monitor realisasinya / perkembangannya/Pantau <input type="checkbox"/> Jadwalkan/Ingatkan waktunya <input type="checkbox"/> Siapkan pointer/sambutan/bahan rapat <input type="checkbox"/> Jawab/Koordinasi konfirmasi dengan YBS/Instansi Terkait <input type="checkbox"/> Membaca/File/Rcferensi	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....				
<b>E CATATAN LAINNYA</b>	<b>PARAF/TANGGAL</b> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">  </div>				



**LEMBAR DISPOSISI PENJABAT BUPATI PURWKARTA 16**

<b>A</b>	<b>AGENDA NASKAH</b>	<b>NO. AGENDA</b> 378
	Tgl. Naskah Masuk Ke Tgl/No. Naskah Asal Naskah Isi Informasi Naskah	: 19-11-2023 : 19-11-2023/- : Agus Waluyo : Surat Keberatan dan Penolakan Warga
<b>B</b>	<b>DITERUSKAN KEPADA</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris Daerah <input checked="" type="checkbox"/> Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat <input type="checkbox"/> Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan <input type="checkbox"/> Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum	<input checked="" type="checkbox"/> Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat <input type="checkbox"/> Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan <input type="checkbox"/> Staf Ahli Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi
<b>C</b>	<b>SIFAT :</b>	
	<input type="checkbox"/> SANGAT SEGERA <input type="checkbox"/> SANGAT RAHASIA	<input checked="" type="checkbox"/> SEGERA <input type="checkbox"/> RAHASIA
<b>D</b>	<b>ISI DISPOSISI</b>	
	<input type="checkbox"/> Wakil/Hadiri/Terima/Agendakan <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> Pelajari/Telaah/Sarannya <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Dikaji Sesuai Ketentuan Yang Ada <input type="checkbox"/> ACC/Realisasikan Sesuai Dengan Ketentuan Yang ada <input type="checkbox"/> Untuk Di Bantu/Dipertimbangkan Sesuai Dengan Ketentuan <input type="checkbox"/> Monitor Realisasinya/Perkembangan/Pantau <input type="checkbox"/> Jadwalkan/Ingatkan Waktunya <input type="checkbox"/> Siapkan Pointer/Sambungan/Bahan Rapat <input type="checkbox"/> Jawab/Koordinasi Konfirmasi Dengan YBS/Instansi Terkait <input type="checkbox"/> Membaca/File/Referensi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>E</b>	<b>CATATAN LAINNYA</b>	<b>PARAF/TANGGAL</b>
	<p>- Camat Darangdan - Dinas LH</p> <p>- Satpol PP - Dinas Pemerintahan</p> <p>- PPM PTP</p> <p>✓ untuk ditindaklanjuti laporan ini secara bersama</p> <p>✓ Laporan hasilnya &amp; rekomendasi</p>	 19/11/23

Purwakarta, 14 November 2023

Kepada Yth.  
PJ Bupati Purwakarta  
Di  
tempat

Perihal: Surat Keberatan dan Penolakan Warga

Dengan hormat,

Assalmualaikum Wr Wb.

Sehubungan dengan adanya tempat pengelolaan limbah bulu ayam yang berlokasi di Desa Depok Kec. Darangdan yang selama ini membuat resah dan mengakibatkan gangguan pernafasan dikarenakan bau busuk yang sangat menyengat untuk itu kami sebagai warga masyarakat Kec. Darangdan merasa keberatan dan menolak dengan adanya tempat tersebut, untuk itu kami meminta kepada PJ Bupati Purwakarta untuk segera menutup tempat tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Masyarakat Kec. Darangdan



Agus Waluyo

0827-2760-2228

M Sulaerman



## SURAT PERNYATAAN KEBERATAN/PENOLAKAN MASYARAKAT

Yang bertanda tangan dibawah ini kami masyarakat Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, menyatakan bahwa dengan adanya tempat pengelolaaah limbah bulu ayam yang berlokasi di Jalan Militer Desa Depok Kecamatan Darangdan sangatlah mengganggu lingkungan, dengan bau busuknya mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu.

Dalam hal ini kami sebagai masyarakat Kecamatan Darangdan keberatan dan menolak dengan adanya tempat pengelolaan limbah bulu ayam tersebut. Kami mohon dengan hormat kepada pihak berwenang untuk segera menutup tempat tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat atas kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Masyarakat Kecamatan Darangdan

NO	NAMA	TID	NO	NAMA	TID
1	Muhamad Sulaeman	[Signature]	30	Riski AR	[Signature]
2	Agus Waluyo	[Signature]	31	Iis	[Signature]
3	NIA	[Signature]	32	Sahrilah	[Signature]
4	BARU	[Signature]	33	Asep A	[Signature]
5	JEJEN	[Signature]	34	Yati Y	[Signature]
6	BONEI	[Signature]	35	BRAN	[Signature]
7	KOLAY	[Signature]	36	MARYATI	[Signature]
8	SULE	[Signature]	37	Endah	[Signature]
9	Ganjo	[Signature]	38	Ati-Rohanda	[Signature]
10	Rochim	[Signature]	39	MUNIRAH	[Signature]
11	TRIM	[Signature]	40	DEDAN	[Signature]
12	DEDE	[Signature]	41	PUDUNG	[Signature]
13	JOPAL	[Signature]	42	NURHASANAH	[Signature]
14	LASTRI	[Signature]	43	DALI	[Signature]
15	ENDANG	[Signature]	44	ZENAB	[Signature]
16	NURAEMI	[Signature]	45	Yuri	[Signature]
17	KING-KING	[Signature]	46	ADIN	[Signature]
18	HERI	[Signature]	47	KOKOM Komala Sari	[Signature]
19	LIA	[Signature]	48	ADI WIRANTO	[Signature]
20	SHANTI	[Signature]	49	ANU NTIN	[Signature]
21	MIRING	[Signature]	50	ENTIS	[Signature]
22	ENGKOT	[Signature]	51	Uyung AHMAD	[Signature]
23	SAEFULOH	[Signature]	52	YATI	[Signature]
24	Itma prianti	[Signature]	53	FERI	[Signature]
25	DEDEH	[Signature]	54	IDA SUASTI	[Signature]
26	JAJA	[Signature]	55	KAISU	[Signature]
27	SRI FATIMAH 'S	[Signature]	56	ARAS Sutanman	[Signature]
28	Asep Ali A.	[Signature]	57	Uar atimah	[Signature]
29	Dewi Lestari	[Signature]	58	NILDA	[Signature]

NO	NAMA	TTD *
59	Hendra	Ht
60	Rufwan	Ran
61	Linda	L
62	Arif Saripadi	Arif
63	Ida	Ida
64	Akmaludin	Akmal
65	Agus. m.	Agus
66	St Louisa	St Louisa
67	Mumu. m.	Mumu
68	St Zubaidah	St Zubaidah
69	Ahmad Juraedi	Ahmad
70	St. Moryati	St. Moryati
71	Dapi Herawati	Dapi
72	dede sth	dede
73	Jenri M.	Jenri
74	TURZI	TURZI
75	Sahrul	Sahrul
76	Soleh	Soleh
77	Sahrul	Sahrul
78	Aab	Aab
79	Asep. sam sul	Asep
80	Rita	Rita
81	wwin	wwin
82	ADG-S	ADG-S
83	RIKI	RIKI
84	RIDWAN	RIDWAN
85	NURAGNI	NURAGNI
86	ELA	ELA
87	NABIL	NABIL
88	Sahini	Sahini
89	St patimela	St patimela
90	IRPAN AB.	IRPAN
91	Lia Yuliana	Lia
92	Neni S.	Neni
93	Margah	Margah
94	Mulyana	Mulyana
95	Yayal.	Yayal
96	Yam	Yam
97	Kuswara	Kuswara

NO	NAMA	TTD
98	Susan	Susan
99	AIDAH	AIDAH
100	Tadi	Tadi
101	YAHYA	YAHYA
102	ENEN	ENEN
103	JUMNAG	JUMNAG
104	LINA	LINA
105	ASEP	ASEP
106	ARIPAN	ARIPAN
107	Rita. a	Rita
108	Harbay gs.	Harbay
109	Rosani	Rosani
110	ITINO	ITINO
111	Papain	Papain
112	Imik	Imik
113	Ran.	Ran.
114	Ahmad al.	Ahmad
115	ANI	ANI
116	Suhman	Suhman
117	Rum an	Rum an
118	Kuswandi	Kuswandi
119	Tita	Tita
120	Arum	Arum
121	UHUR	UHUR
122	Udi. m	Udi
123	ORA.	ORA.
124	ASAL	ASAL
125	Melisa	Melisa
126	Yusuf	Yusuf
127	Ado. s	Ado
128	RAUVA	RAUVA
129	Uti	Uti
130	Oman	Oman
131	Karlino	Karlino
132	Sumiati	Sumiati
133	Sanki	Sanki
134	Nita	Nita
135	Adi	Adi
136	Ade	Ade

Ade Lili

Tembusan :

1. PJ. Gubernur Jawa Barat
2. PJ. Bupati Kabupaten Purwakarta
3. Satpol PP
4. Dinas Perizinan
5. Camat Kecamatan Darangdan







**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmtsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmtsp.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 3 Oktober 2023

Nomor : PW.04.02/936-DALAKS/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pengaduan Pengelolaan Limbah  
Bulu Ayam

Kepada Yth.  
Bapak M. Sulaeman  
Kp. Nanggaleng RT.03/001 Desa Depok  
Kec. Darangdan Kab. Purwakarta  
di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan dari saudara pada pemberitaan online di Media Mitra Hukum Bhayangkara mengenai keluhan warga terhadap bau menyengat dari tempat pengelolaan limbah bulu ayam dan belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Dinas teknis terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan no surat : PW.04.02/921-DALKS/2023 tanggal 27 September 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA



Disahkan secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARMAN BUDIANDORO, ST.MT  
Pangkat II, 17/10/23

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
4. Yth. Camat Darangdan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( D P M P T S P )**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794  
Website : dpmptsp.purwaktakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwaktakab.go.id

---

Purwakarta, 27 September 2023

Nomor : PW.04.02/921-DALKS/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Tindaklanjut Pengaduan Pengelolaan  
Limbah Bulu Ayam

Kepada Yth.  
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta  
di-

PURWAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Kanal Pengaduan Terpadu Perizinan dan Investasi (Gardu Pasti) pada Tanggal 19 September 2023 terkait pemberitaan online dari Media Mitra Hukum Bhayangkara, perihal adanya keluhan warga terhadap bau menyengat dari tempat pengelolaan limbah bulu ayam dan belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berlokasi di Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.

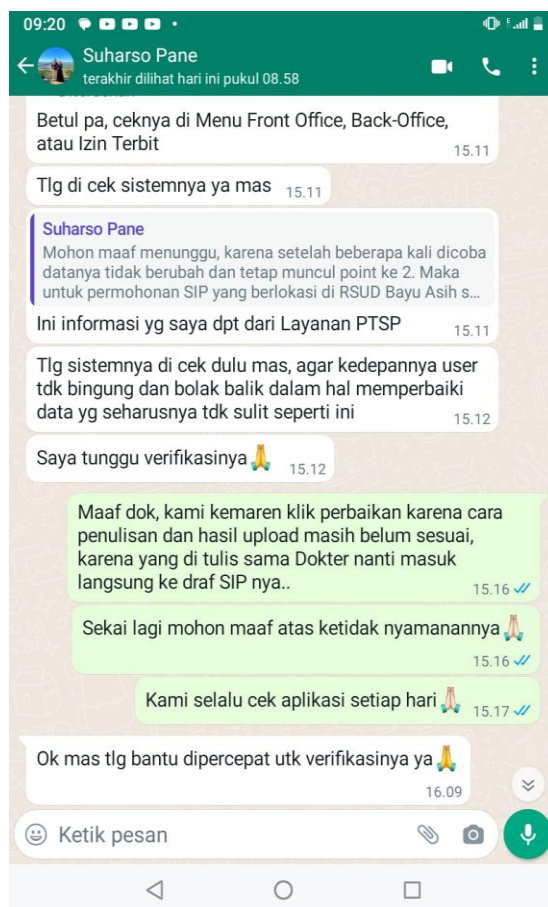
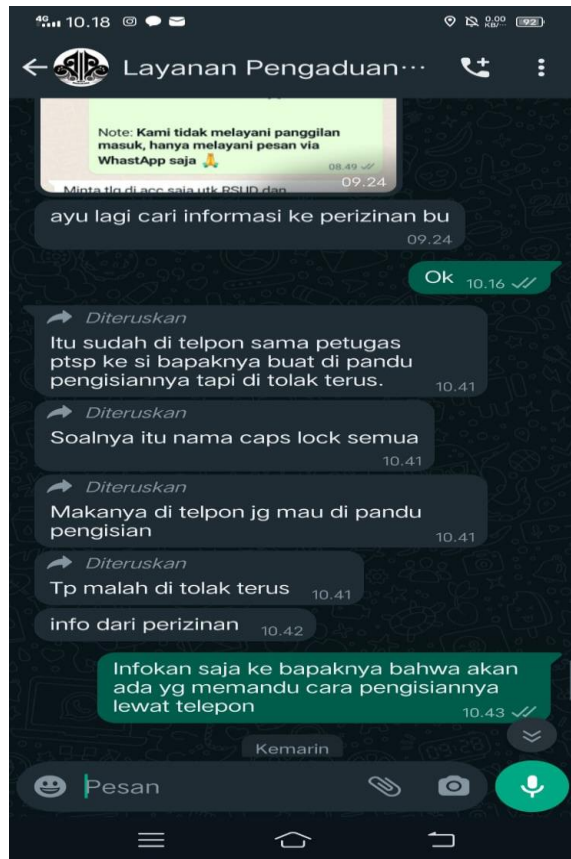
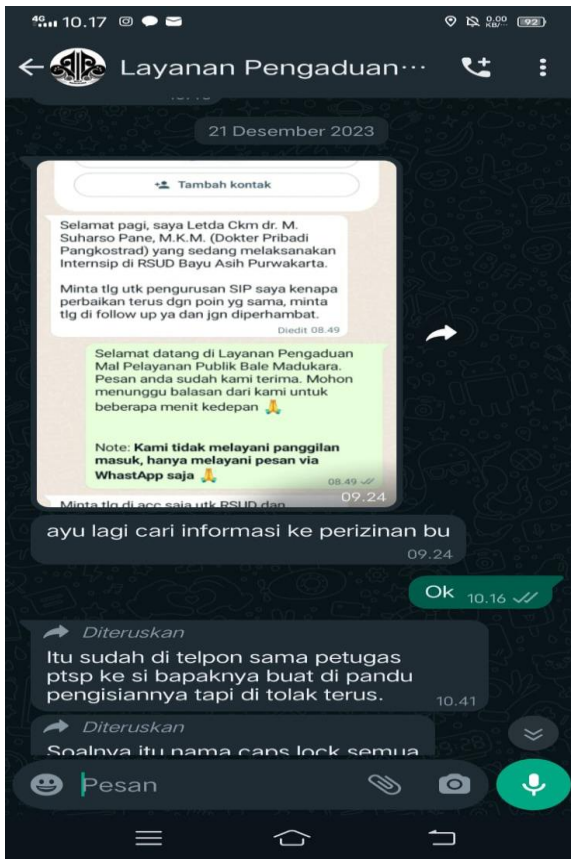
Berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Purwakarta No. 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (3) huruf © yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah; dan huruf (e) pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pasal 8 Ayat (2) bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Bupati Purwakarta No. 161 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 208 ;  
Ayat (1) Penertiban Bangunan Gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dilakukan dengan tahapan :
  - a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - b. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DOKUMENTASI GARDU PASTI  
MENERIMA PENGADUAN PESAN SINGKAT WHATSAPP  
PERIHAL SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER PRIBADI PANGKOSTRAD**

( 21 DESEMBER 2023 )







**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA**